

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari, Gunungkidul 55812  (0274) 391539
 inspektorat@gunungkidulkab.go.id  inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik maupun dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026
INSPEKTUR,



* MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19701206 199603 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis yang pertama adalah “Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan”
 - Diukur dengan indikator Nilai Maturitas SPIP (hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi.
 - Target capaian indikator sasaran Tahun 2025 sebesar 3,890 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 3,728. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2024 (3,666). Realisasi Tahun 2025 terhadap target adalah sebesar 95,84%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan fokus penilaian yang sebelumnya hanya SPIP menjadi penggabungan antara SPIP, MRI, IEPK dan KAPIP.
 - Capaian sasaran strategis yang kedua adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”
 - Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah)
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target nilai capaian indikator sasaran Tahun 2025 sebesar 82,50 namun sampai laporan ini disusun, LKjIP masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah sehingga dalam menghitung pencapaian sarannya masih menggunakan Nilai AKIP tahun 2024 yaitu 83,13 (kategori A) Dengan demikian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. prosentase realisasi terhadap target mencapai 100,76%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 101,85% terjadi penurunan sebesar 1,09 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP

Jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang terbatas dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan (Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, Puskesmas, Kalurahan). pada Tahun 2025, Jumlah auditor sebanyak 27 orang dari total kebutuhan 62 orang dan jumlah PPUPD sebanyak 6 orang dari kebutuhan 16 orang.

c. Tindak Lanjut Temuan

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal kurang optimal.

d. Tantangan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Diperlukan kompetensi khusus dalam melaksanakan Audit dengan tujuan tertentu, yang harus dipenuhi melalui pengembangan kompetensi APIP dan/atau permintaan bantuan tenaga ahli.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ...	3
D. Tugas, Fungsi dan Peta jabatan.....	5
E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	7
F. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Anggaran	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	14
C. Struktur Program dan Kegiatan.....	18
D. Perjanjian Kinerja	23
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	42
B. Capaian Kinerja Lainnya	51
C. Realisasi Efisiensi Anggaran	54
D. Inovasi	
BAB IV PENUTUP.....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta Perubahannya	
2) LHE AKIP Tahun 2024	
3) Tanggapan Atas LHE AKIP Tahun 2024	
4) Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	
5) Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas oleh BPKP atas Kapabilitas APIP I	
6) Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh BPKP	
7) Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh BPKP	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	9
Tabel I.2	Sarana-Prasarana	11
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025	12
Tabel II.1	Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2021-2026	13
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel II.3.1	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel II.3.2	Struktur Program dan kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	19
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	20
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel III.4	Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Terintegrasi	27
Tabel III.5	Capaian Sasaran	28
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	28
Tabel III.7	Perbandingan Nilai Maturitas SPIP Pemkab Gunungkidul, Pemerintah DIY dan Pemkab/kota se Wil DIY	29
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.9	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	30
Tabel III.10	Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Tahun 2025	32

Tabel III.11	Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu Tahun 2025	33
Tabel III.12	Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Tahun 2025	34
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025	35
Tabel III.14	Sasaran, Indikator, dan Meta Indikator	37
Tabel III.15	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024	38
Tabel III.16	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	39
Tabel III.17	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	40
Tabel III.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	41
Tabel III.19	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	41
Tabel III.20	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42
Tabel III.21	Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	46
Tabel III.22	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	52
Tabel III.23	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Cascading Kinerja	3
Gambar I.2.	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	4
Gambar I.3	Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	6
Gambar II.1	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	21
Gambar II.2	Aplikasi SIMTLHP	21
Gambar II.3	Aplikasi SIPTL BPK	22
Gambar III.1	Capaian MCSP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	44
Gambar III.2	Capaian TLHP BPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	48
Gambar III.3	Capaian SPI KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

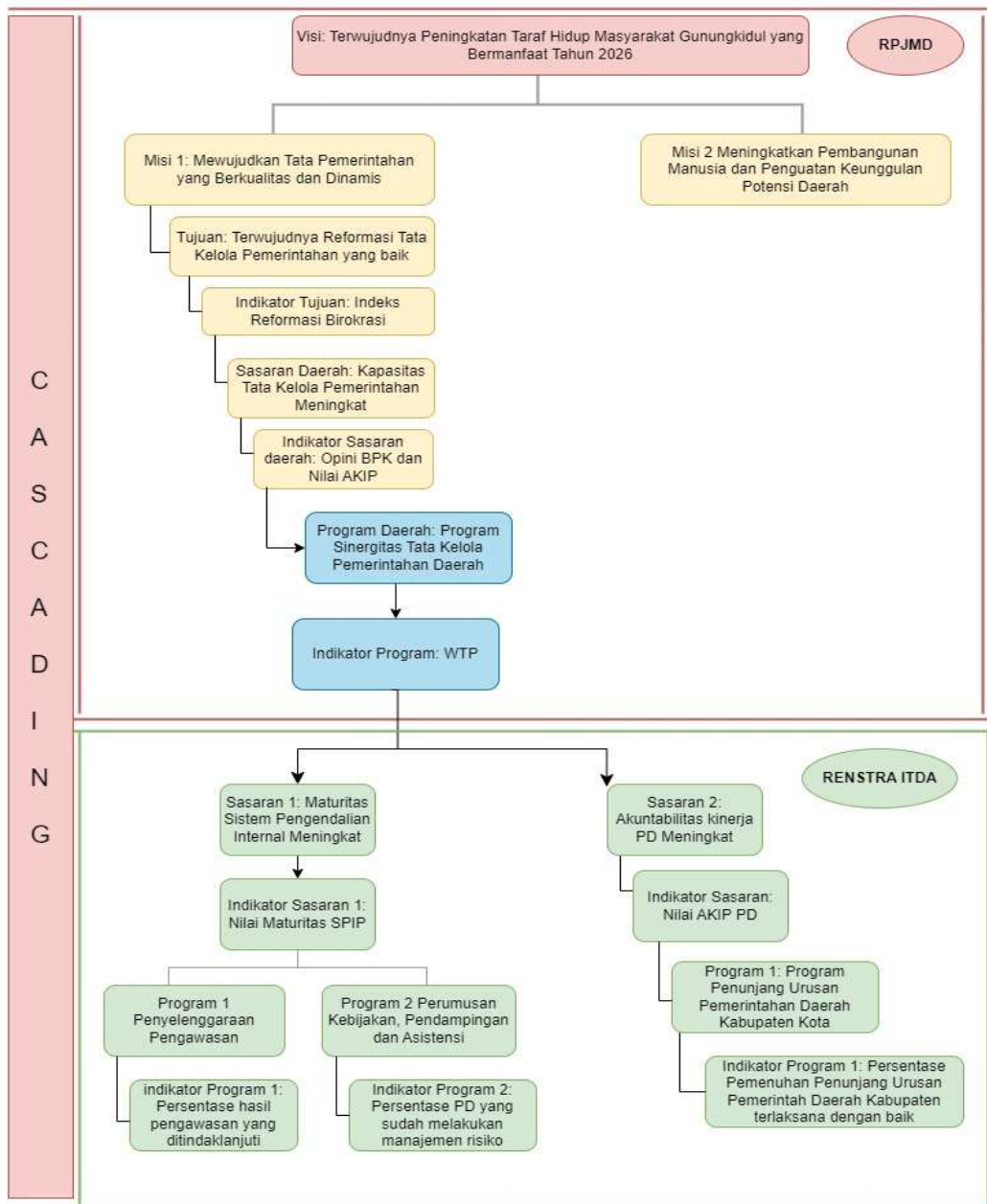
Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026, maka LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan Tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

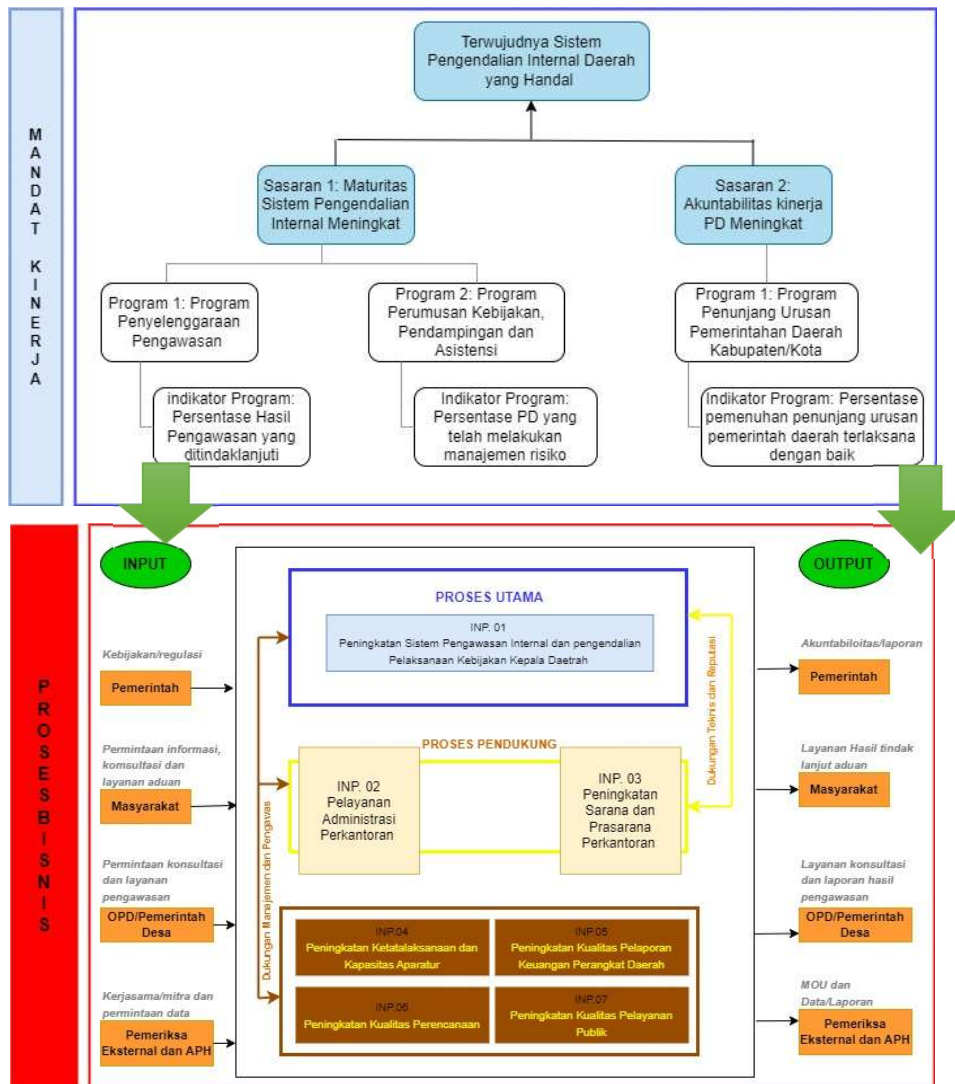
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



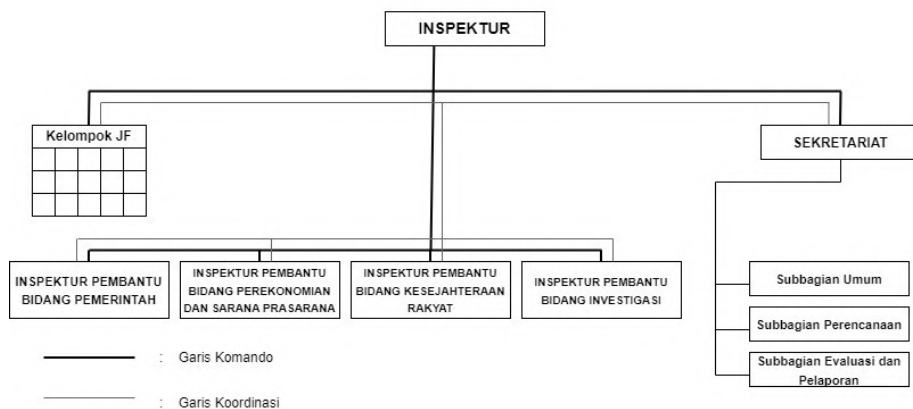
Gambar I.1. Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Gambar 1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

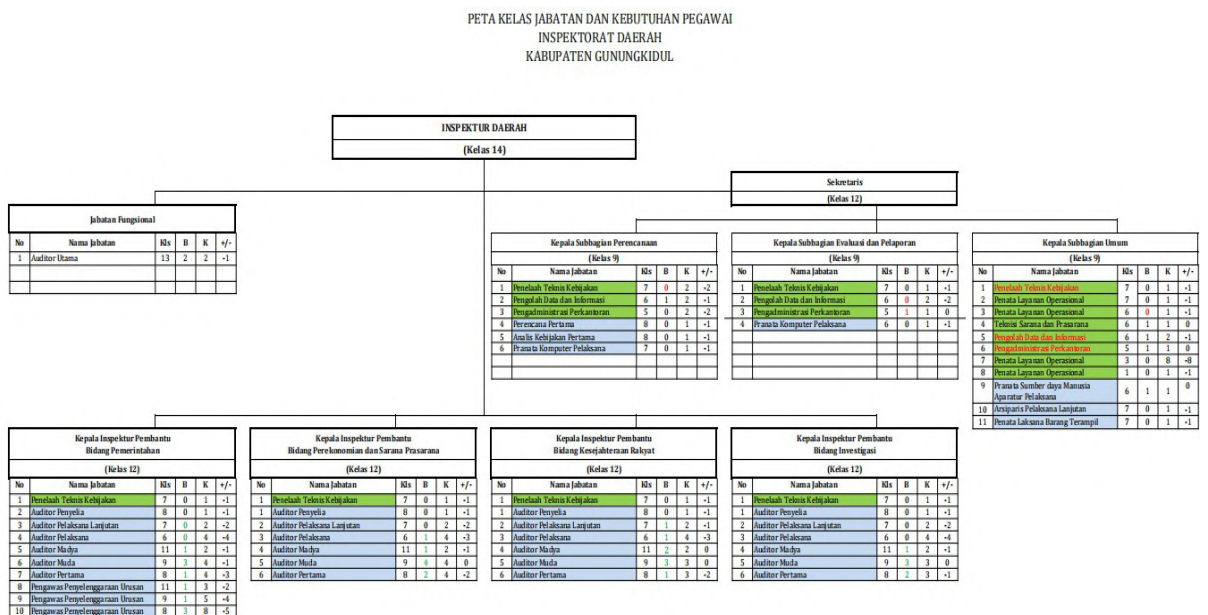
Inspektorat Daerah mempunyai tugas Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) perumusan perencanaan program pengawasan;
- 4) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 6) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah;
- 7) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 8) pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;

- 9) pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- 10) penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- 11) pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 12) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 13) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 14) pengorganisasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Inspektorat;
- 15) penyelenggaraan system pengendalian intern dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 16) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 17) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
- 18) pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

Gambar I.3. Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul



E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perubahan yang mendasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

Isu strategis lain yang perlu untuk dilaksanakan adalah:

1. monitoring dan evaluasi pencegahan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan survey penilaian integritas oleh KPK;
2. pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem informasi pengawasan yang terintegrasi;
3. peningkatan kapabilitas APIP terkait pemenuhan jumlah jam diklat per orang minimal 120 jam per tahun;
4. mandatori pengawasan dari pusat antara lain reviu Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah serta Manajemen Pajak Daerah sebagaimana amanat KPK terkait *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP)* yang memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi tingkat nasional;

F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana merupakan dua komponen vital dalam kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah/SKPD. SDM berkualitas dengan kompetensi teknis (pendidikan, pelatihan) menentukan keberhasilan pengelolaan organisasi, sementara sarana prasarana yang terencana mendukung peningkatan nilai tambah dan efisiensi kerja. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Parawais yang ada						Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S3	S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1		1				1	
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	5		5			5	1	3	1			4	1
	2. Pengawas	3		3			3			3			2	1
	3. Pelaksana	33		11	14	8	5			1		4	5	0
C.	Jabatan Fungsional	78		60	18		39		7	25	7		24	15
	Jumlah	120		80	32	8	53	1	11	30	7	4	36	17

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul per Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Inspektorat tersebar pada jenjang SMA sampai dengan S3. Tingkat pendidikan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 30 orang (56,60%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 11 orang (20,75%), D3 sebanyak 7 orang (13,21%), SLTA sebanyak 4 orang (7,55%), dan S3 sebanyak 1 orang (1,89%). Pada jabatan pelaksana administrasi masih ada pegawai berlatar belakang pendidikan yang masih kurang dari kualifikasi jabatan yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 36 orang, lebih besar dibandingkan pegawai perempuan sebanyak 17 orang. Untuk jabatan struktural dari Formasi 9 dijabat oleh Perempuan 2 orang. Analisa terhadap komposisi 2 wanita dari 9 jabatan struktural (atau sekitar 22%) menunjukkan adanya representasi perempuan, namun masih jauh dari kesetaraan gender yang ideal (50:50). Situasi ini mencerminkan dominasi laki-laki yang signifikan dalam pengambilan keputusan (78% laki-laki).

Pada Tahun 2025 ada tambahan pegawai baik dari CPNS, PPPK ataupun mutasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana tercantum dalam peta jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 67 orang, terdiri dari 39 orang pejabat fungsional dan 28 pejabat pelaksana. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Subbagian Evaluasi dan Pelaporan yang menangani 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, tetapi hanya didukung 1 (satu) orang pelaksana. Hal ini berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga pengawas Pemerintah Daerah.

Adapun sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai Lembaga Pengawas Pemerintah Daerah, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, didukung dengan 4 (empat) unit kendaraan operasional, dan 8 (delapan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang arsip, mushola, ruang baca, gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet.

Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Edaran ini mewajibkan penyelenggara pelayanan publik menyediakan 14 sarpras ramah kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu hamil, anak-anak) untuk mewujudkan pelayanan yang inklusif, adil, dan setara.

Penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan juga merupakan kepedulian untuk menjamin dan melindungi hak kelompok rentan dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh mengakses pelayanan publik dengan mudah, aman, nyaman, dan mandiri. Penyediaan Sarana dan Prasarana tersebut antara lain :

1. Ruang laktasi berukuran 2 x 2 m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan sofa.
2. Bangunan dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan :
 - a. pintu masuk yang mudah diakses;
 - b. toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
 - c. ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan.
3. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
4. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
5. Sarana dan prasarana konsultasi serta pengaduan
6. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan Kesehatan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1	Genset	1 unit	0,00
2	Kendaraan Operasional	14 unit	35.478.571,38
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	45 unit	3.133.333,68
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	515 unit	227.073.702,42
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	15 unit	34.525.250,05
6	Alat Laboratorium	1 unit	624.999,84
7	Komputer	133 unit	198.485.927,36
8	Gedung dan Bangunan	2 unit	3500042800
Aset Tetap Lainnya			
1	Buku Perpustakaan	139 buku	16.783.326,00
Jumlah			4.016.147.910,32

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	BELANJA DAERAH	8.531.585.774,00	8.122.633.574,00	(408.952.200,00)
5 1	BELANJA OPERASI	7.844.455.794,00	7.438.573.184,00	(405.882.610,00)
5 1 1	Belanja Pegawai	4.569.807.374,00	4.369.807.374,00	(200.000.000,00)
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	3.274.648.420,00	3.068.765.810,00	(205.882.610,00)
5 2	BELANJA MODAL	687.129.980,00	684.060.390,00	(3.069.590,00)
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.569.980,00	415.521.990,00	41.952.010,00
5 2 2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.560.000,00	268.538.400,00	(45.021.600,00)
	Jumlah Belanja	8.531.585.774,00	8.122.633.574,00	(408.952.200,00)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk Tahun 2025 Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul semula Rp8.531.585.774,00 kemudian dalam perubahan anggaran menjadi Rp8.122.633.574,00 sehingga berkurang sebesar Rp408.952.200,00. Hal ini terdapat pengurangan pada pengurangan belanja pegawai, dikarenakan adanya 1 orang ASN yang meninggal dunia dan 1 orang yang mutasi keluar daerah.

BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai *cascading* kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah “*Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang Handal*”

Tabel II.1 Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2021-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKA TOR KINERJA	SATUAN	Base line 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,86	3,87	3,88	3,89	3,90	3,90
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	Nilai	81	81	81,50	82	82,50	83	83

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Gunungkidul (2021-2026) berfokus pada penguatan pengawasan internal yang berintegritas, normatif, dan terpercaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini menekankan akselerasi kapabilitas APIP, pencegahan tindak pidana korupsi, serta pengawasan berbasis risiko pada OPD dan Pemerintahan Desa.

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan kualitas belanja daerah 2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset
2.	Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat	Melaksanakan penyelenggaraan pengawasan yang mendukung meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Melaksanakan pendampingan reviu terhadap laporan keuangan PD dan PPKD secara berkala dalam mewujudkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat	Mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu dalam pelaporan baik keuangan maupun fisik

C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul disusun berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Struktur ini diatur untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan anggaran belanja tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, serta pencapaian Visi Misi.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Murni	Perubahan	
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	548.369.400,00	585.383.400,00	37.014.000,00
	Kegiatan :			
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	316.650.000,00	315.480.000,00	(1.170.000,00)
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	26.340.000,00	26.340.000,00	0,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50.045.000,00	50.045.000,00	0,00
	Reviu Laporan Kinerja	25.025.000,00	25.025.000,00	0,00
	Reviu Laporan Keuangan	24.660.000,00	24.660.000,00	0,00
	Pengawasan Desa	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00
	Kerja Sama Pengawasan Internal	18.530.000,00	17.410.000,00	(1.120.000,00)
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	126.250.000,00	126.200.000,00	(50.000,00)
	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	231.719.400,00	269.903.400,00	38.184.000,00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55.696.400,00	60.086.400,00	4.390.000,00
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	176.023.000,00	209.817.000,00	33.794.000,00
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.069.008.900,00	773.834.900,00	(295.174.000,00)
	Kegiatan :			
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00
	2. Pendampingan dan Asistensi	1.053.608.900,00	758.434.900,00	(295.174.000,00)
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	255.720.000,00	231.670.000,00	(24.050.000,00)
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	93.010.000,00	23.066.000,00	(69.944.000,00)
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	587.432.500,00	434.252.500,00	(153.180.000,00)
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	117.446.400,00	69.446.400,00	(48.000.000,00)
Akuntabilitas kinerja PD meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.914.207.474,00	6.763.415.274,00	(150.792.200,00)
	Kegiatan :			
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.600.500,00	34.800.500,00	200.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.255.000,00	30.455.000,00	200.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	360.000,00	360.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	360.000,00	360.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	642.000,00	642.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	555.000,00	555.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	736.500,00	736.500,00	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.573.500.374,00	4.373.500.374,00	(200.000.000,00)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.569.807.374,00	4.369.807.374,00	(200.000.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	693.000,00	693.000,00	0,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rn)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	367.008.800,00	331.214.390,00	(35.794.410,00)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.007.000,00	14.007.000,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	353.001.800,00	317.207.390,00	(35.794.410,00)
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	994.304.400,00	974.651.210,00	(19.653.190,00)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.630.400,00	18.630.400,00	9.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390.084.980,00	438.563.990,00	48.479.010,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	196.871.000,00	197.271.000,00	400.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.560.020,00	24.063.820,00	503.800,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	359.578.000,00	281.542.000,00	(78.036.000,00)
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.864.000,00	79.864.000,00	0,00
	Pengadaan Mebel	79.864.000,00	79.864.000,00	0,00
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.330.000,00	111.332.400,00	(18.997.600,00)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.030.000,00	105.032.400,00	(18.997.600,00)
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.599.400,00	858.052.400,00	123.453.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.800.000,00	260.800.000,00	(14.000.000,00)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.270.000,00	529.723.000,00	137.453.000,00

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.729.400,00	50.729.400,00	0,00
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		8.531.585.774,00	8.122.633.574,00	(408.952.200,00)

Sumber: DPPA Inspektorat Daerah Tahun 2025

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2025, dirinci dalam tabel II.3.2 sebagai berikut :

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	548.369.400,00	585.383.400,00	37.014.000,00
	Kegiatan :			
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	316.650.000,00	315.480.000,00	(1.170.000)
	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	231.719.400,00	269.903.400,00	38.184.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.069.008.900,00	773.834.900,00	(295.174.000,00)
	Kegiatan :			
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00
2. Pendampingan dan Asistensi	1.053.608.900,00	758.434.900,00	(295.174.000,00)	
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		1.617.378.300,00	1.359.218.300,00	(258.160.000,00)

Sumber: DPPA Inspektorat Daerah Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen komitmen formal antara pimpinan instansi pemerintah (pemberi amanah) dan bawahan (penerima amanah) yang menetapkan sasaran kerja, indikator kinerja, dan target yang terukur dalam satu tahun anggaran. PK menjadi landasan akuntabilitas, evaluasi keberhasilan/ kegagalan, dan dasar pemberian penghargaan atau sanksi.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	Maturitas SPIP	Indeks	3,90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	3.90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	83	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	83

Pada Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, karena adanya refocusing penyesuaian kegiatan dan realokasi anggaran yang sudah ditetapkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 namun tidak merubah target fisiknya, seperti dalam tabel berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	Maturitas SPIP	Indeks	3,90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	3.90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai (kategori)	83)	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	83.0

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	548.369.400,00	APBD
Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi	773.834.900,00	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.763.415.274,00	APBD

Keterangan Tambahan:

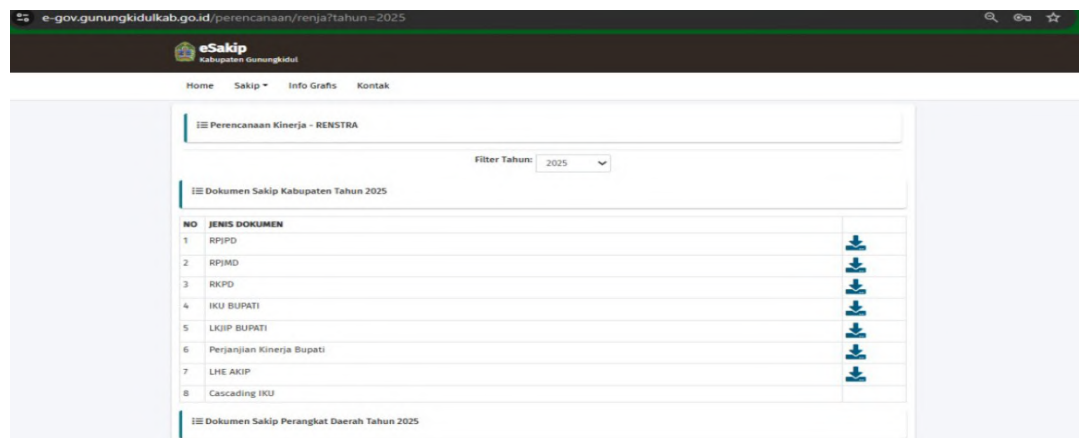
1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah;
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV;
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi; dan
5. Tidak mengelola Dana Keistimewaan.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen atau piranti pendukung capaian kinerja perangkat daerah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan memantau, mengendalikan, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut adalah instrumen dan aplikasi yang digunakan di Insektorat :

1. E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah platform digital terpadu untuk menyusun, memantau, dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah secara online. Aplikasi ini mengotomatisasi penyusunan laporan kinerja, mempercepat verifikasi, serta mengintegrasikan perencanaan dan hasil kerja, untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas birokrasi.



Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, e-SAKIP

2. SIMTLHP (Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan), yaitu Instrumen penilaian kemajuan tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang mengintegrasikan data tindak lanjut hasil pengawasan



Gambar II.2. Aplikasi SIMTLHP

3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI SIPTL merupakan aplikasi BPK DIY yang memuat informasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK DIY. Data obyek pemeriksaan, jumlah pemeriksaan, temuan dan rekomendasi serta penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.



Gambar II.3. Aplikasi SIPTL BPK

BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2024
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian kinerja adalah hasil konkret, terukur, dan akuntabel yang diperoleh suatu instansi atau individu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ini mencakup perbandingan antara realisasi (hasil aktual) dengan target, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun efisiensi waktu, untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	META INDIKATOR		BASE LINE 2021	CAPAI AN 2024	TAHUN 2025			KRITERIA/ KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PER SEN TASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Meningkatkan	<u>Indikator:</u> Nilai Maturitas SPIP berdasarkan PM dari Tim PM SPIPT Kab Gunungkidul yang hasilnya akan dievaluasi oleh BPKP Perwakilan DIY <u>Meta Indikator:</u> Interval skor <i>Maturity Level SPIP</i> dengan karakteristik sebagai berikut: Level 0 : jika skor kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$) Tingkat maturitas belum ada Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) tingkat maturitas rintisan Level 2: jika skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) tingkat maturitas berkembang Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) tingkat maturitas terdefinisi Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) tingkat maturitas terkelola dan terukur Level 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) Tingkat maturitas optimum	skor	3,85	3,66	3,89	3,728	98,84	Sangat Baik	3,90
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkatkan	<u>Indikator:</u> Nilai AKIP PD <u>Meta Indikator:</u> Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)	skor	82	83,02	82,50	83,13	100,76	Sangat Baik	

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Kinerja sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat diukur dengan indikator Nilai Maturitas SPIP. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	<p><i>Maturity Level</i> penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>.</p> <p>Nilai Maturitas SPIP berdasarkan hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dari Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Kabupaten Gunungkidul yang hasilnya akan dievaluasi oleh BPKP Perwakilan DIY</p> <p>Interval skor <i>Maturity Level SPIP</i> dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <p>Level 0 : jika skor kurang dari 1,0 (0 < 1,0) tingkat maturitas belum ada</p> <p>Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurang dari 2 (1,0 ≤ skor < 2,0) tingkat maturitas rintisan</p> <p>Level 2 : jika skor 2,0 s/d kurang dari 3 (2,0 ≤ skor < 3,0) tingkat maturitas berkembang</p> <p>Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurang dari 4 (3,0 ≤ skor < 4,0) tingkat maturitas terdefinisi</p> <p>Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5) tingkat maturitas terkelola dan terukur</p> <p>Level 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5) tingkat maturitas optimal</p>

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui mekanisme Penilaian Mandiri (PM) oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) yaitu proses evaluasi independen oleh Inspektorat/ APIP terhadap hasil Penilaian Mandiri (PM) maturitas penyelenggaraan SPIP di instansi terkait. Tujuannya memastikan konsistensi, keandalan bukti dukung, dan objektivitas penilaian sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang mencakup tiga komponen utama: penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan kapabilitas APIP secara terintegrasi.

Pihak yang terlibat dalam penilaian maturitas SPIP terintegrasi yaitu pimpinan Instansi/ OPD, yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan penilaian mandiri (PM) SPIP di lingkungan masing-masing. Asesor Manajemen Risiko (Tim PM) melakukan self-assessment atau penilaian mandiri atas kualitas penerapan SPIP, manajemen risiko, dan indeks efektivitas pengendalian.

Inspektorat atau APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah): Bertanggung jawab melakukan Penjaminan Kualitas (PK) terhadap hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim PM masing masing OPD,

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan): Melakukan evaluasi akhir atas hasil penjaminan kualitas dari APIP dan menerbitkan skor akhir level maturitas.

Penilaian ini mencakup seluruh unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasilnya mempengaruhi nilai Manajemen Risiko, Indeks Reformasi Birokrasi (RB), dan nilai MCSP KPK.

Target capaian indikator sasaran Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidu Tahun 2025 sebesar 3,890 terealisasi 3,728 (95,84%), masuk level tiga dengan kategori tingkat maturitas “terdefinisi”,

artinya karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan walaupun belum efektif. Selain itu Kabupaten Gunungkidul tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi, selain itu juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi.

Selanjutnya dilaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan diperoleh maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Gunungkidul berada di level “terdefinisi”. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,727”

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian berdasarkan hasil input pada sistem SPIP terintegrasi menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel III.4. Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi

No.	Komponen Penilaian	PM		PK	
		Level	Skor	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	3	1,600	3	1,600
2.	Struktur dan Proses	3	1,018	3	1,017
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	1,110	3	1,110
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3	3,728	3	3,727

Berdasarkan data tersebut, maka capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.5 berikut:

Tabel III.5 Capaian Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Maturitas SPIP	3,890	3,728	95,84	Sangat Baik

Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, sedangkan pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2024	2024	2025		
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Maturitas SPIP	3,85	3,62	3,99	3,666	3,728	3,90	95,59

Target capaian indikator sasaran Tahun 2025 sebesar 3,89 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 3,728. Realisasi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2024 (3,666). Realisasi Tahun 2025 terhadap target adalah sebesar 95,84%.

Dari hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebesar 3,728 dan kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Gunungkidul selaku APIP menghasilkan skor 3,727 selanjutnya dilakukan evaluasi akhir oleh BPKP.

Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025 oleh BPKP berdasarkan surat Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah Nomor PE.09.04/5-456/D4/04/2025, tanggal 30 Desember 2025, nilai Maturitas SPIP terintegrasi Kab. Gunungkidul sebesar 3,072 di level 3 kategori 'terdefinisi'.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.7 Perbandingan Nilai Maturitas SPIP
Pembkab Gunungkidul, Pemerintah DIY dan Pemkab/kota se Wil DIY

No	Nama Inspektorat	Tahun Penilaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Propinsi DIY	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Kota Yogyakarta	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Kabupaten Bantul	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
4.	Kabupaten Sleman	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5.	Kabupaten Gunungkidul	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6.	Kabupaten Kulon Progo	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Dari tabel diatas, Nilai maturitas SPIP Pemerintah kabupaten Gunungkidul berada pada Level 3 sama dengan capaian Nilai SPIP Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian target sasaran maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti.
2. Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase PD yang sudah melakukan Manajemen Risiko.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel III.8. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target pengawasan}} \times 100\%$
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan MR}}{\text{Seluruh PD}} \times 100\%$

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat tersaji pada berikut :

Tabel III.9. Capaian Kinerja Program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Maturitas SPIP	95,84%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan terlaksana	100	100	Sangat Baik
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terfasilitasi	100	100	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Indikator Program					100	100	Sangat Baik

Capaian kinerja program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal secara berkala;

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Fokus utamanya adalah menjamin efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan (Quality Assurance) melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan kinerja dan keuangan. Inspektorat juga berperan preventif mencegah tindak pidana korupsi.

Kegiatan pengawasan internal secara berkala mencakup beberapa sub kegiatan diantaranya pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja, reviu laporan keuangan, pengawasan Desa, Kerjasama Pengawasan Internal dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan adanya pengawasan ke obyek pemeriksaan diharapkan agar pelaksanaan kegiatan di OPD yang diperiksa bisa sesuai dengan aturan atau pedoman yang berlaku sehingga akan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan atau pelanggaran.

Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan intern/ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Berikut merupakan Realisasi Anggaran pada program strategis yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

Tabel III.10. Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan dan Pengawasan Tahun 2025

No.	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
		1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	26.340.000	26.247.952	99,65
		2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50.045.000	46.663.199	93,24
		3) Reviu Laporan Kinerja	25.025.000	20.624.386	82,42
		4) Reviu Laporan Keuangan	24.660.000	15.052.193	61,04
		5) Pengawasan Desa	45.800.000	45.142.904	98,57
		6) Kerja Sama Pengawasan Internal	17.410.000	14.278.551	82,01
		7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	126.200.000	119.736.560	94,88
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			315.480.000	287.745.745	91,21

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pengawasan yang telah ditetapkan dalam Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disahkan oleh Bupati Gunungkidul pada tanggal 20 Desember 2024. Audit dengan tujuan tertentu merupakan kegiatan audit yang diselenggarakan dalam rangka Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pemberian peringatan dini atau *early warning system*, atas perintah pimpinan, permintaan/pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka menindaklanjuti aduan masyarakat maupun pengembangan atas temuan hasil pemeriksaan.

Tahun 2025 telah dilaksanakan 25 Audit dengan Tujuan Tertentu dengan rincian sebagai berikut:

1. Investigasi sebanyak 3 (tiga) audit
2. Probity Audit sebanyak 8 (delapan) audit
3. Perintah Pimpinan sebanyak 14 (duapuluh delapan) audit

Berikut merupakan realisasi anggaran kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

Tabel III.11. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu Tahun 2025

No.	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
		1) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	269.903.400,00	201.338.869,00	74,60
Jumlah Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			269.903.400,00	201.338.869,00	74,60

2. Evaluasi Capaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan tujuan :

1. Terpenuhinya Standar Audit Intern khususnya penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Terwujudnya prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang, serta

memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan ketepatan ruang lingkup pengawasan (audit).

Realisasi anggaran pada program strategis yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat tertuang pada tabel berikut :

Tabel III.12. Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Tahun 2025

No	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
1)		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.950.000,00	5.592.321,00	62,48
2)		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.450.000,00	1.942.437,00	30,11
Jumlah Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			15.400.000,00	7.534.758,00	48,93

b. Pendampingan dan Asistensi

Tujuan pendampingan dan asistensi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendorong perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Kegiatan ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi, manajemen risiko, dan pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),

Dengan Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan inspektorat, meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terkait Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada OPD se Kabupaten

Gunungkidul. Pendampingan dan asistensi dilakukan dalam segala aspek pelaksanaan ketugasan di OPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu bentuk hubungan kemitraan antara auditor dan obyek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa. Selain itu dalam perumusan kebijakan diperlukan masukan dari pihak terkait lainnya sebagai mitra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Berikut merupakan Realisasi Anggaran pendampingan dan asistensi yang berkaitan langsung terhadap sasaran strategis Inspektorat :

Tabel III.13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Tahun 2025

No.	Nama Program	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi :			
		1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	159.175.000	156.210.000	97,96
		2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	108.650.000	103.975.000	61,93
		3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	434.252.500	418.869.587,00	96,46
		4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	69.446.400	26.807.040,00	38,60
Jumlah Anggaran Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			267.825.000	260.185.000	73,74

Faktor yang menghambat pencapaian target terhadap program prioritas Inspektorat Daerah antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP

Jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang terbatas dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan (Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, Puskesmas, Kalurahan). pada Tahun 2025, Jumlah auditor sebanyak 27 orang dari total kebutuhan 62 orang dan jumlah PPUPD sebanyak 6 orang dari kebutuhan 16 orang.

2. Tindak Lanjut Temuan

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal kurang optimal.

3. Tantangan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kebutuhan pengawasan khusus (investigasi) terhadap kasus-kasus tertentu membutuhkan keahlian khusus yang terbatas. Tingginya beban kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang tidak terprediksi, seperti permintaan mendadak dari aparat penegak hukum, pengaduan masyarakat, atau perintah Bupati.

Solusi/ strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM APIP

Lebih mengoptimalkan Pelaksanaan *In House Training* (PKS) atau pelatihan teknis fungsional secara mandiri dan intensif untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance, Consulting dan Early Warning.

2. Memperkuat Metode *Risk Based Audit* dan Konsultatif

Meningkatkan peran "Klinik Konsultasi" Inspektorat untuk memberikan asistensi preventif sebelum audit dilakukan (mencegah, bukan hanya menemukan) dan Audit dilakukan fokus pada area berisiko tinggi dan berdampak besar.

3. Optimalisasi Pengawasan Berbasis Teknologi (e-Audit)

Mengintensifkan penggunaan teknologi informasi *Sistem Pengawasan Terintegrasi* (Wasgitel) untuk pemantauan tindak lanjut secara *real-*

time dan efisien dan Pengembangan digitalisasi data objek pengawasan (E-Audit) agar APIP bisa melakukan *desk-review* lebih efektif.

4. Peningkatan Sinergi Pengawasan (APIP-BPK-APH)

Sinergi lebih erat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPK untuk penanganan temuan yang krusial.

Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP) diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.14 Sasaran, Indikator dan Meta Indikator

Sasaran (1)	Indikator (2)	Meta Indikator (3)
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Target kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,5 (A), namun sampai laporan ini disusun, LKJIP masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD Tahun 2025 masih menggunakan nilai AKIP Tahun 2024.

Parameter evaluasi AKIP terdiri dari Perencanaan Kinerja (Bobot ~30%) yang meliputi Dokumen Renstra (strategis 5 tahun) dan RKT/Renja (tahunan) yang memuat visi, misi, sasaran, dan indikator kinerja utama (IKU). selanjutnya Pengukuran Kinerja (Bobot ~25%) berupa penilaian sejauh mana indikator kinerja tercapai, penggunaan IKU, serta

pengumpulan data kinerja secara berkala. Pelaporan Kinerja (LKjIP), yaitu penyusunan laporan yang transparan mengenai realisasi kinerja dibandingkan target. dan terakhir Evaluasi Kinerja Internal (AKIP) yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat atau tim internal untuk perbaikan manajemen.

Capaian Kinerja adalah hasil akhir yang diukur, termasuk pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan. Evaluasi AKIP Tahun 2024 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan perincian sebagai berikut :

Tabel III.15. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,22
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,81
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,10
	JUMLAH	100%	83,13
	PREDIKAT		A

Hasil evaluasi AKIP dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/Ev-LKJ/18 tanggal 26 Maret 2025 menunjukkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 83,13 (*delapan puluh tiga koma satu tiga*) dengan predikat A.

Predikat A pada evaluasi SAKIP pada Inspektorat Daerah artinya Inspektorat Daerah mendapatkan nilai dalam rentang 80–90 dan dikategorikan "Memuaskan". Capaian ini menunjukkan Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul memiliki sistem kinerja yang sangat baik, efisien, efektif, dan telah menerapkan prinsip akuntabilitas mulai dari perencanaan hingga pelaporan secara terukur.

Berikut detail terkait predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) :

1. Tingkat Nilai: Predikat A diberikan untuk rentang 80 - 90
2. Makna: Instansi dinilai mampu menyeimbangkan antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai (performance-based budgeting), serta telah memiliki manajemen kinerja yang solid.
3. Implikasi: Instansi tersebut dinilai tidak hanya sekedar melengkapi administrasi, tetapi kinerja yang dihasilkan memberikan dampak nyata (birokrasi berdampak).

Predikat ini merupakan pengakuan atas komitmen tinggi pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan target sasaran kinerja yang ditetapkan dalam renstra, maka capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.16 sebagai berikut:

Tabel III.16. Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	82,5	83,13	100,76	Sangat Baik

Dari data tersebut diatas masih menggunakan realisasi tahun 2024 terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 82,5 terealisasi 83,13 sehingga capaian kinerja sebesar 100,76. Nilai AKIP tahun 2024 sebesar 83,13 (A) meningkat dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 yaitu 83,02 (A).

Dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) Nomor 700.1.2.7/Ev-LKJ/18 tanggal 26 Maret 2025 terdapat beberapa saran/ rekomendasi dan langsung ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Tabel III.17
Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Kondisi	Saran/ Rekomendasi	Tindaklanjut
	PERENCANAAN KINERJA		
1.	<p>Dokumen Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, masih terdapat sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific measurable, Achievable, Realistic, Time Bound) sebagai ukuran strategis dan indikator kinerja Inspektorat berupa Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) kurang tepat, karena sesuai kewenangannya Maturitas Penyelenggaraan SPIP seharusnya menjadi IKU Pemerintah Daerah.</p>	<p>Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja sehingga rumusan/ tujuan/ sasaran dan indikatornya berorientasi outcome dan memenuhi kriteria indicator yang SMART pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan</p>	<p>Dokumen usulan perubahan rumusan tujuan/ sasaran dan indikatornya yang berorientasi pada Outcome dan memenuhi kriteria indicator SMART pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2030</p>
	<p>Target sasaran strategis Maturitas SPIP yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis karena penetapan target berdasarkan hasil penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, seharusnya berdasarkan hasil Evaulasi yang dilaksanakan oleh BPKP, Hal ini mengakibatkan perncapaian atas target sasaran Strategis Maturitas SPIP Kurang Optimal.</p>	<p>Melakukan reviu dan perbaikan dokumen PERencanaan Kinerja sehingga target yang ditetapkandalam perencanaan kinerja dapat dicapai (Achievable), menantang dan realistis sesuai tatakala perencanaan.</p>	<p>Usulan penetapan target dalam perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya pada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030</p>

2.	PENGUKURAN KINERJA		
	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada Rekomendasi	-
3.	PELAPORAN KINERJA		
	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada Rekomendasi	
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada Rekomendasi	

Tabel III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkatkan	Nilai AKIP PD	80,71	81,77	83,02	83,13	83	100,16

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.19 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$

Tabel III.20 Capaian Kinerja Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	100,76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100,00	100,00 Sangat Baik

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100,00%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik. Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat pencapaian Sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik berupa kendaraan dinas operasional masih terbatas, tidak sebanding dengan beban ketugasan.
2. Masih terbatasnya kapasitas SDM Pelayanan.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan kendaraan dinas operasional.
2. Mengikutsertakan pegawai dalam diklat/bimtek manajemen pelayanan publik.
3. Memaksimalkan penggunaan ruang dan sarana yang tersedia

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

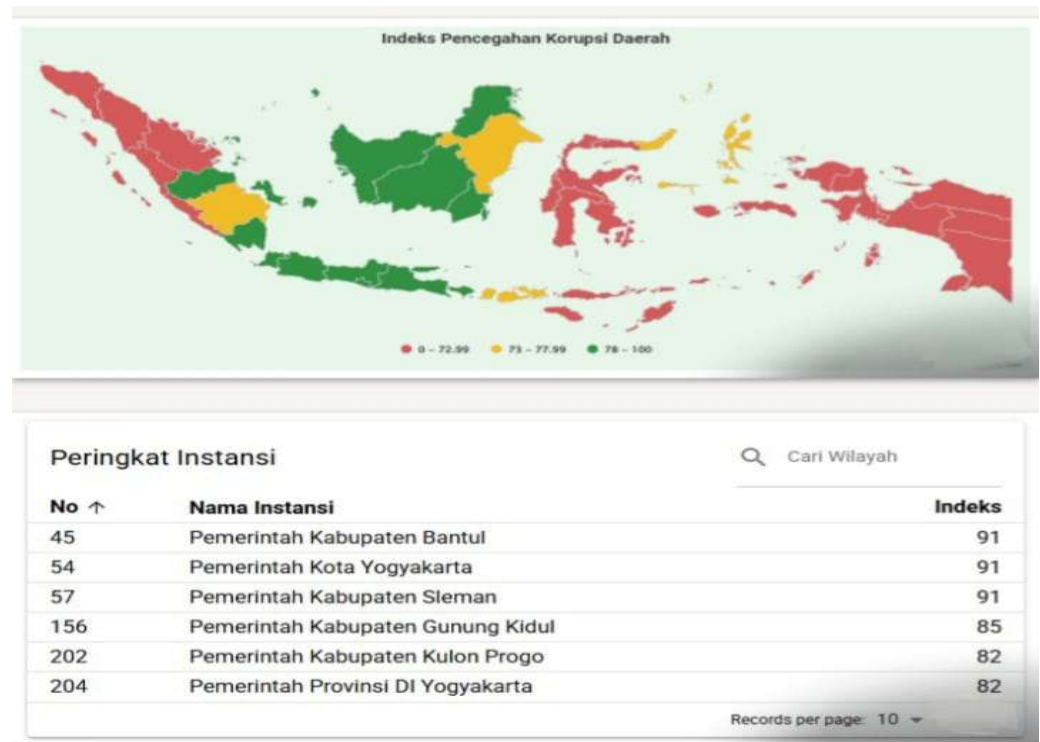
1. Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pegawai di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya:
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan Bappeda, dan BKAD dalam rangka penyusunan anggaran belanja:
3. Adanya kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik, komitmen, profesionalitas, kejujuran yang baik dari karyawan, serta adanya aturan teknis dan SOP.

B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention(MCSP)

MCSP KPK sejatinya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Elemen tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah, atau instansi yang rentan terhadap korupsi dan menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi gambaran strategis dan prioritas rekomendasi yang akan memberikan arahan bagi upaya pencegahan korupsi. Sebagaimana tugas dan fungsi KPK dalam koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka KPK membentuk MCSP di setiap Pemerintah Daerah dan berkolaborasi dengan Inspektorat sebagai koordinator di setiap

daerah. Berikut Peta capaian Nilai MCSP Tahun 2025 secara nasional dan peringkat di Propinsi DIY :



Gambar III.1. Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Nilai MCSP KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dengan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mencapai nilai sebesar 85,20 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 97,12 namun nilai tersebut masih masuk Zona Hijau/ Aman dan telah memenuhi target secara nasional. Penyebabnya turunnya nilai MCSP tersebut disebabkan beberapa faktor:

Berdasarkan data dan laporan terkait Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024-2025, penurunan skor integritas atau indikator pencegahan korupsi di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Meski indeks MCSP/ MCP 2024 sempat mencapai skor tinggi, ditemukan beberapa kelemahan yang menjadi sorotan di tahun 2025:

- Kelemahan pada Kebijakan Layanan Publik: Terdapat area dalam kebijakan pelayanan publik yang dinilai masih perlu perbaikan substansial agar lebih transparan dan akuntabel.
- Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP): Masih ditemukan kelemahan dalam kapasitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh internal pemerintah (Inspektorat), sehingga memengaruhi skor indikator *Surveillance*.
- Optimalisasi Tata Kelola Aset (BMD): Area Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi salah satu fokus akselerasi/perbaikan karena pemenuhan bukti dukung yang belum maksimal.
- Tindak Lanjut Hasil SPI: Penurunan nilai SPI dari periode sebelumnya (2023-2024) mencerminkan perlunya tindak lanjut yang lebih intensif atas rekomendasi KPK.

Upaya Pemkab Gunungkidul 2025:

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi penurunan ini dengan memperkuat indikator MCSP (khususnya area perencanaan, pelayanan publik, dan aset) sepanjang tahun 2025.

2. Evaluasi Kapabilitas APIP

Peningkatan Kapabilitas APIP mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Pengawasan Intern dan memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, serta membantu organisasi mencapai tujuannya melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.

Untuk memperkual dan menunjang pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP Tahun 2025 maka dilakukan evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP.

Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 hasil evaluasi dan Penjaminan Kualitas kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.21. Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Komponen Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri (PM)		Hasil Evaluasi (PK –Penjamin Kualitas)	
		Level	Skor	Level	Skor
1.	Kualitas Peran dan Layanan		1.200		0.88
2.	Profesionalisme penugasan		0.580		0.46
3.	Manajemen pengawasan		0.640		0.40
4.	Pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan		0.350		0.23
5.	Budaya dan hubungan organisasi		0.300		0.26
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3	3.072	2	2.22

Hasil Evaluasi Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebesar 2,22 turun dibanding tahun 2024 sebesar 3,380 Inspektorat Daerah berada di level 2 (terstruktur) yang menunjukkan bahwa APIP mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultasi (advisory)) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih rendah.

Penurunan level kapabilitas APIP tersebut disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme penilaian berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah yang meliputi 5 (lima) elemen yaitu :

- a. Kualitas peran dan layanan;
- b. Profesionalisme penugasan;
- c. Manajemen pengawasan;
- d. Pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan; dan
- e. Budaya dan hubungan organisasi

3. Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan kolaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 terealisasi **81,01** naik sedikit dibanding tahun 2024 80,78. Dengan hasil tersebut secara umum dapat mencerminkan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul **BAIK**.

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
2005 -2020	346	717	715	1	0	1
2021	7	17	16	1	0	0
2022	10	27	26	1	0	0
2023	18	57	56	1	0	0
2024	20	61	52	9	0	0
2025	12	29	17	12	0	0
Jumlah	413	908	882	25	0	1

Sumber Data: Aplikasi SIPTL

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sampai dengan Tahun 2025 dilakukan melalui aplikasi SIPTL, rekapitulasi temuan, rekomendasi dan tindak lanjut periode 2005 – 2025 Jumlah temuan 413 , jumlah Rekomendasi 908, Jumlah tindak lanjut terdiri dari selesai tindak lanjut 907 rekomendasi (99,89%), tindak lanjut masih dalam proses 0 rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai 25 rekomendasi (27,53%) dan Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah 1 rekomendasi .

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut Selesai	Tindak Lanjut Dalam Proses	Tindak Lanjut Belum Sesuai	Tindak Lanjut Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Total Nilai (IDR)
2012	43	103	103	0	0	0	IDR 2.281.510.453,34
2013	24	42	42	0	0	0	IDR 88.661.654,50
2014	38	74	74	0	0	0	IDR 648.628.617,86
2015	34	77	77	0	0	0	IDR 16.725.000,00
2016	12	16	15	1	0	0	IDR 81.956.000,00
2017	34	48	47	0	0	1	IDR 185.473.748,22
2018	10	34	34	0	0	0	IDR 947.630.244,81
2019	10	29	29	0	0	0	IDR 1.055.052.851,79
2020	14	29	29	0	0	0	IDR 9.479.465.916,18
2021	7	17	16	0	0	1	IDR 1.925.654.407,83
2022	10	27	26	0	0	1	IDR 3.138.956.072,48
2023	18	57	56	0	0	1	IDR 219.951.753,40
2024	20	61	52	9	0	0	IDR 3.78.643.259,69
2025	12	29	17	12	0	0	IDR 416.255.296,31
Jumlah	413	908	907	25	0	1	IDR 1.203.208.120,00

Gambar III.2. Capaian TLHP BPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

5. Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI merupakan alternatif pengukuran atau perangkat diagnostik yang dirancang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat membantu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk memetakan persoalan integritas dan risiko korupsi yang dihadapi saat pelaksanaan tugas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan bagian dari kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK yang ditujukan untuk membantu memperkuat perencanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan korupsi baik bagi K/L/PD maupun KPK. SPI tahun 2025

akan dilaksanakan pada 542 Pemerintah Daerah dan 95 Kementerian/Lembaga dengan metode e-SPI (online survey). Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul turun dibanding tahun 2024 80,08, kategori “Terjaga” menjadi 74,45 kategori “waspada”



Gambar III.3. Capaian SPI KPK Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Kategori "Waspada" dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK atau penilaian risiko, merujuk pada hasil pemetaan yang menunjukkan adanya potensi atau risiko korupsi/pelanggaran integritas yang cukup tinggi, namun belum mencapai tahap sangat parah (kritis). Berikut adalah penjabaran maksud kategori tersebut:

- Peringatan (Warning): Lembaga atau daerah yang mendapat status waspada artinya memiliki celah kerentanan (misalnya pada tata kelola anggaran, perjalanan dinas, atau pelayanan publik) yang jika tidak segera diperbaiki dapat meningkat menjadi risiko tinggi.

- **Kebutuhan Tindakan Perbaikan:** Ini adalah sinyal dari survei SPI KPK agar instansi terkait segera mengambil langkah-langkah pencegahan, memperbaiki sistem, dan meningkatkan integritas agar statusnya membaik.
- **Risiko Sedang-Tinggi:** Dalam pemetaan risiko, kategori ini sering berada di level menengah-tinggi yang memerlukan pengawasan ketat, meskipun belum berada di titik tertinggi.

6. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program telah dilakukan dengan mempertimbangkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP (*gender analysis pathway*) GBS (*Gender budget statement*) dan Kerangka Acuan Kerja (*KAK*)/*Term of Reference (TOR)* pada setiap

tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara uji petik pada 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Capaian kinerja Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Gunungkidul difokuskan pada pengawasan dan audit pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender di berbagai instansi teknis.

Secara umum, Inspektorat Daerah Gunungkidul pada tahun 2025 bertindak sebagai pengawas internal (APIP) untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah responsif gender dan meminimalisir kesenjangan.

Capaian atas Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2026 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebagai berikut:

- Pelaksanaan Reviu RKA 2026 atas 45 Perangkat Daerah untuk melakukan pengujian apakah Perangkat Daerah telah melaksanakan erencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berupa penyusunan GAP dan TOR Responsif gender terhadap Sub Kegiatan dengan anggaran paling besar di setiap bidang teknis Tahun 2026
- Pelaksanaan Audit Ketaatan pada 3 perangkat Daerah dengan sasaran pengarusutamaan gender pada 2025 (pada BKPPD, DPP dan Dinas pariwisata)
- Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan PUG pada Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2025

C. Realisasi Efisiensi Anggaran

Anggaran Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 4 Desember 2025 ditetapkan sebesar Rp 8,122,633,574.00 telah menyerap anggaran sebesar 7,298,830,903.00 sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp 823,802,671.00 atau 89,86%

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan yang terdiri dari 2 program 4 kegiatan dengan sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan dan 1 program 7 kegiatan dengan sasaran peningkatan akuntabilitas pemerintah, disajikan dalam tabel III.22 berikut ini :

Tabel III.22. Realisasi Anggaran Program dan kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisien si (%)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	585,383,400.00	489,084,614.00	emerinta h 83.55	96,298,786.00	16.45
1)	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	315,480,000.00	287,745,745.00	91.21	27,734,255.00	8.79
2)	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	269,903,400.00	201,338,869.00	74.60	68,564,531.00	25.40
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	773,834,900.00	694,430,616.00	89.74	79,404,284.00	10.26
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15,400,000.00	7,534,758.00	48.93	7,865,242.00	51.07

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisien si (%)
2)	Pendampingan dan Asistensi	758,434,900.00	686,895,858.00	90.57	71,539,042.00	9.43
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,763,415,274.00	6,115,315,673.00	90.42	648,099,601.00	9.58
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,800,500.00	33,646,521.00	96.68	1,153,979.00	3.32
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,373,500,374.00	3,822,866,980.00	87.41	550,633,394.00	12.59
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	331,214,390.00	306,419,597.00	92.51	24,794,793.00	7.49
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	974,651,210.00	940,247,346.00	96.47	34,403,864.00	3.53
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,864,000.00	78,772,920.00	98.63	1,091,080.00	1.37
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111,332,400.00	93,534,088.00	84.01	17,798,312.00	15.99
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	858,052,400.00	839,828,221.00	97.88	18,224,179.00	2.12
	Jumlah Keseluruhan	8,122,633,574.00	7,298,830,903.00	89.86	823,802,671.00	10.14

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025

Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel III.22 sebagai berikut:

Tabel III.23. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	3,89	3,728	95,84	1,359,218,300	1,183,515,230	87.07	12.93
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82.5	83,13	100,76	6,763,415,274.00	6,115,315,673.00	98,41	1,61
Jumlah Belanja Total					8,122,633,574	7,298,830,903	89.86	10.14
Jumlah Belanja Program Utama					1,359,218,300	1,183,515,230	87.07	12.93
Jumlah Belanja Program Penunjang					6,763,415,274	6,115,315,673	90.42	9.58

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel III.23 di atas capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1,359,218,300, terealisasi Rp1,183,515,230 atau 87,07% sehingga terdapat efisiensi dana sejumlah Rp175,703,070 atau 12,93 % yang bersumber dari:

- Efisiensi kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Efisiensi kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- Efisiensi belanja Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Efisiensi belanja Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. SIGRAK (Operasi Pengendalian Gratifikasi)

Penyelenggara Negara dalam pelaporan Gratifikasi belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. Jarak Penyelenggara Negara dengan layanan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) relatif jauh;

SIGRAK merupakan salah satu inovasi sebagai upaya pencegahan korupsi. Dengan layanan SIGRAK, Penyelenggara Pemerintah dapat melakukan pelaporan penerimaan gratifikasi secara mudah dan praktis melalui :

- a) Hotline SIGRAK dengan nomor 082324675656.
- b) Mobil SIGRAK, sebagai mobil layanan pelaporan penerimaan gratifikasi

2. Aplikasi **WASGITEL** (Pengawasan Gunungkidul Terintegrasi Elektronik)

Dalam rangka menjawab kebutuhan akan ketugasan APIP yang menuntut kecepatan, keakuratan, akuntabilitas serta menjawab tantangan dan peluang di era digital Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul membangun Aplikasi Wasgitel yang merupakan sistem Informasi audit terintegrasi secara elektronik. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada acara Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Mei 2025 (26-27 Mei 2025). Menu Aplikasi Wasgitel yang telah siap digunakan antara lain :

- a. SEMAR (Sistem elektronik Manajemen Risiko)
- b. NAKULA (Navigasi Tindak Lanjut Laporan Audit)

Sedangkan menu yang dalam proses pengembangan antara lain:

- a. BAGONG (Bagian Pengendalian Gratifikasi, Pencegahan Korupsi dan Pengaduan)
- b. SADEWA (Sistem Informasi Audit, Review dan Asistensi)
- c. PETRUK (Pusat Edukasi dan Transformasi Untuk Konsultansi)

3. Sosialisasi Anti Korupsi

Inspektorat Daerah (Inspektorat) Gunungkidul secara masif mensosialisasikan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Internalisasi Anti Korupsi di berbagai kapanewon (kecamatan) selama Juli-Agustus 2025. Kegiatan ini fokus pada pencegahan, pendidikan, dan penindakan, termasuk pencantuman *footnote* anti gratifikasi serta pemutaran video antikorupsi sebelum rapat untuk membangun budaya integritas.

Poin-Poin Penting Sosialisasi Anti Korupsi Inspektorat Gunungkidul tahun 2025:

- Dasar Hukum: Sosialisasi berlandaskan SE Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2025 tentang Internalisasi Anti Korupsi di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
- Tema Utama sosialisasi terkait pencegahan dengan membangun sistem untuk menutup peluang korupsi, terkait pendidikan dilakukan Internalisasi nilai-nilai antikorupsi bagi aparatur, termasuk lurah dan perangkat kalurahan, dan aksi nyata dengan pencantuman kalimat anti gratifikasi pada dokumen resmi dan pemutaran video antikorupsi saat rapat.
- Tujuan: Menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan akuntabel di tingkat kalurahan hingga kabupaten.

Kegiatan ini juga didukung dengan adanya survei penilaian integritas (SPI) untuk memantau budaya anti korupsi di Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tantangan dan Hambatan Kinerja Inspektorat Gunungkidul Tahun 2025 :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP
Jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang terbatas dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan (SKPD, Puskesmas, Kalurahan).
2. Kompleksitas Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Audit)
Penerapan *Risk Based Audit* yang masih terus dikembangkan menuntut pemahaman tinggi, sementara data risiko di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terupdate secara *real-time*.
4. Tindak Lanjut Temuan
Masih adanya kelambatan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh auditan (OPD/Kalurahan), meskipun inspektorat sudah melakukan reuiu.
5. Tantangan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Kebutuhan pengawasan khusus (investigasi) terhadap kasus-kasus tertentu membutuhkan keahlian khusus yang terbatas.

Faktor Pendukung Tercapainya Kinerja 2025 :

1. Komitmen SDM melalui Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan teknis fungsional pengawasan dan *In House Training* (PKS) untuk meningkatkan kompetensi auditor.
2. Peningkatan Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

Fokus pada peningkatan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparat pengawasan.

3. Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*)

Inspektorat menerapkan manajemen pengawasan berbasis risiko untuk meminimalisir risiko yang dihadapi APIP dan temuan, sehingga pengawasan lebih efektif dan terukur.

4. Digitalisasi Pengawasan

Peluncuran dan penggunaan Aplikasi SIGRAK dan Sistem Pengawasan Terintegrasi (Wasgitel) untuk mempermudah pemantauan tindak lanjut dan efisiensi laporan.

5. Peran Proaktif dan Konsultatif

Sosialisasi anti korupsi serta klinik konsultasi dan tindakan preventif yang aktif untuk memberikan saran dini (pencegahan) kepada Perangkat Daerah.

Adapun langkah-langkah perbaikan Inspektorat yang akan dilakukan ke depan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Daerah, pada tahun 2026 Inspektorat Daerah mengambil dan menetapkan motto “Simpatik” (sifat memecahkan masalah dan memberikan kebahagiaan) serta *tagline* “Int” (Integritas, Normatif, Terpercaya) sebagai mental model kinerja SDM.

2. Peningkatan Kompetensi SDM APIP

Lebih mengoptimalkan Pelaksanaan *In House Training* (PKS) atau pelatihan teknis fungsional secara mandiri dan intensif dan Sertifikasi keahlian khusus untuk Irbansus (Inspektur Pembantu Khusus) atau Investigasi.

3. Optimalisasi Pengawasan Berbasis Teknologi (e-Audit)

Mengintensifkan penggunaan *Sistem Pengawasan Terintegrasi* (Wasgitel) untuk pemantauan tindak lanjut secara *real-time* dan efisien dan Pengembangan digitalisasi data objek pengawasan (E-Audit) agar APIP bisa melakukan *desk-review* lebih efektif.

4. Memperkuat Metode *Risk Based Audit* dan Konsultatif

Meningkatkan peran "Klinik Konsultasi" Inspektorat untuk memberikan asistensi preventif sebelum audit dilakukan (mencegah, bukan hanya

menemukan) dan Audit dilakukan fokus pada area berisiko tinggi dan berdampak besar.

5. Peningkatan Sinergi Pengawasan (APIP-BPK-APH)

Sinergi lebih erat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPK untuk penanganan temuan yang krusial.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPTOYO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 14 April 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

SAPTOYO, S.Sos., M.Si.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2026	Indeks	3.90
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026	Nilai (Kategori)	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Indeks	3,89
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	82,50 (A)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 548.369.400,00	DAU
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 1.069.008.900,00	DAU
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.914.207.474,00	DAU

Wonosari, 14 April 2025

Pihak Kedua,

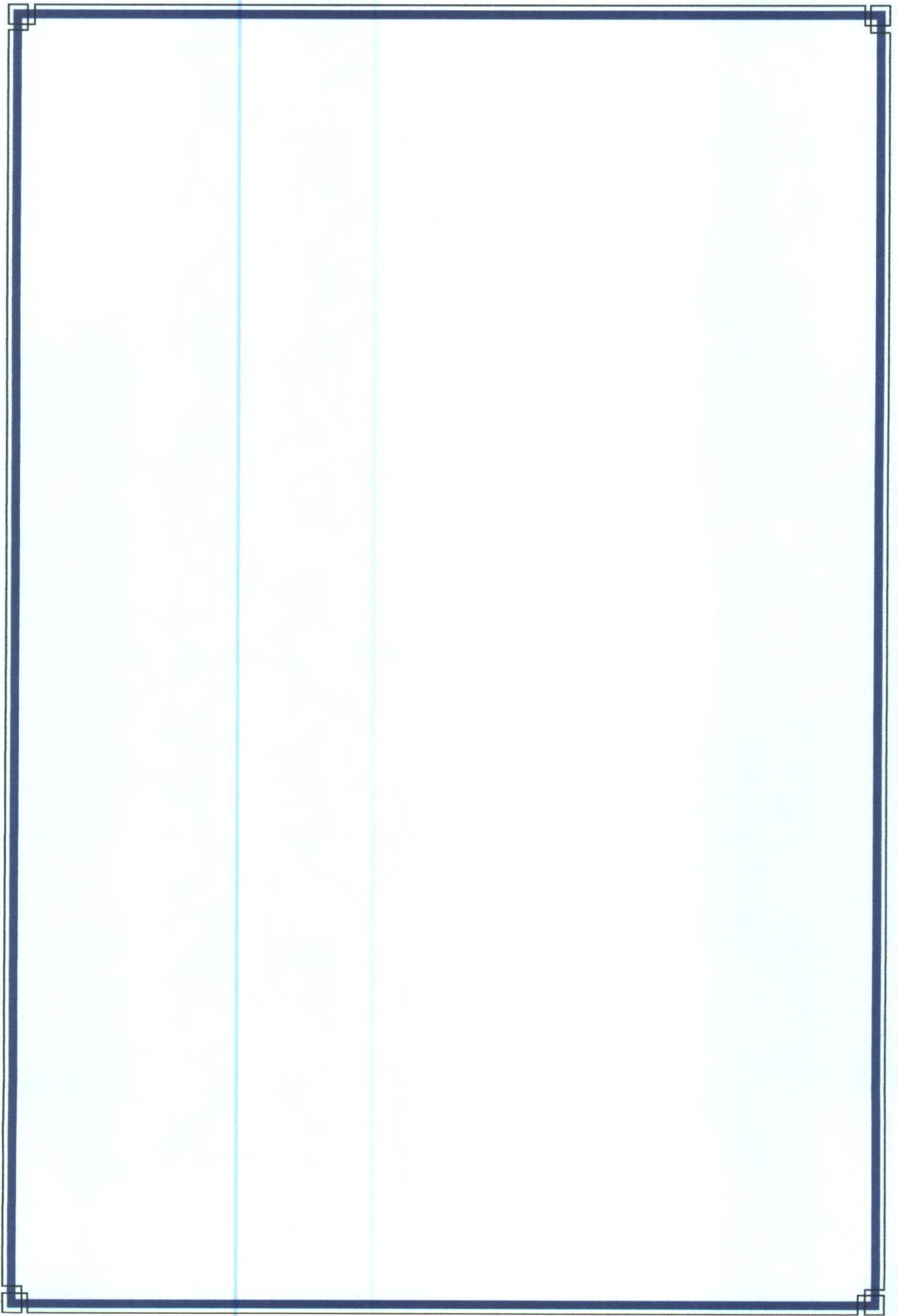


ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,



SAPTOYO, S.Sos., M.Si





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA I
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2026 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026	Indeks	3.90
			Nilai (Kategori)	83

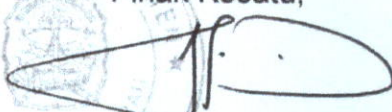
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Indeks	3,89
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	82,50 (A)


	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 548.369.400,00	DAU
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 1.069.008.900,00	DAU
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.914.207.474,00	DAU

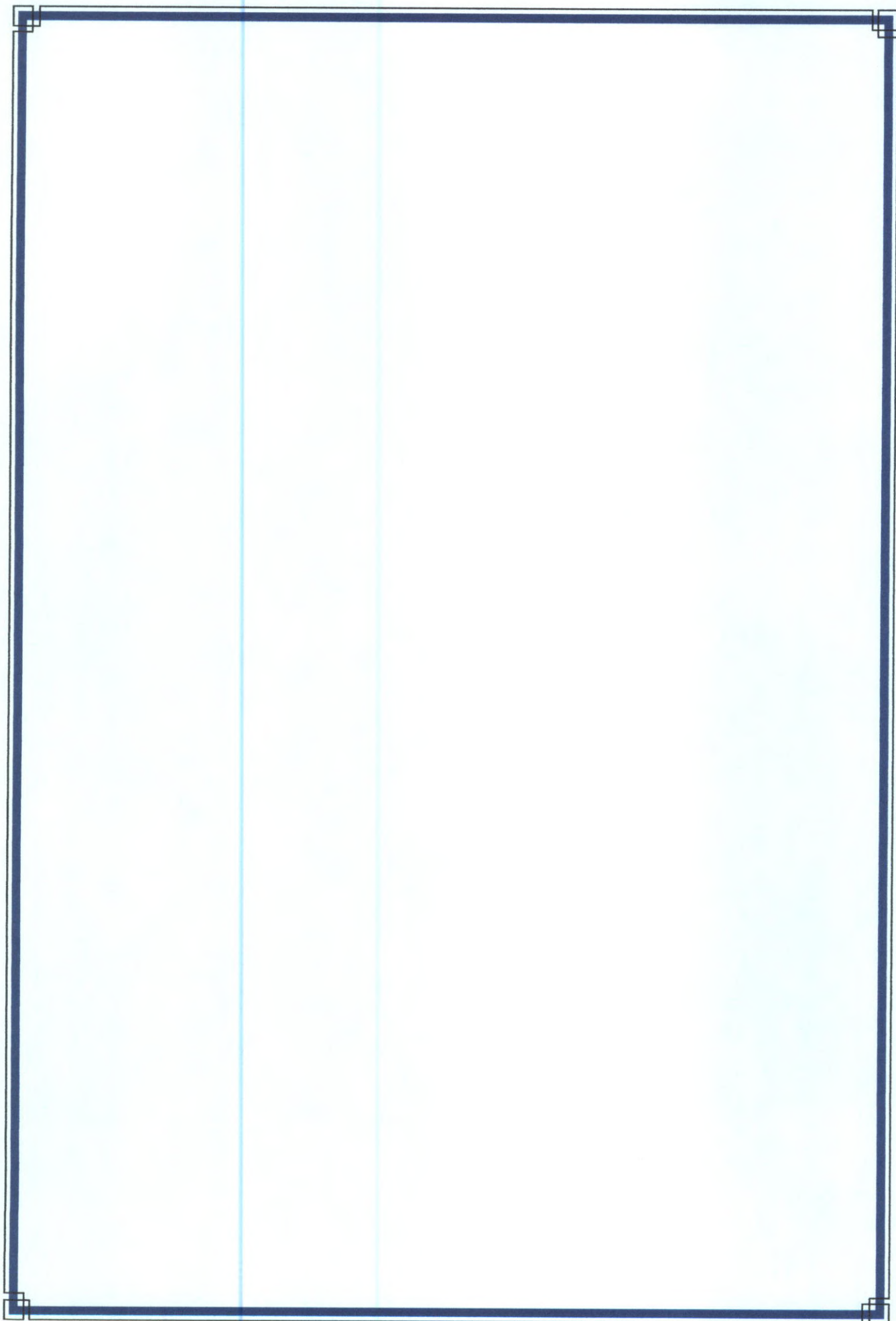
Pihak Kedua,

SUNARYANTA



Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

SAPTOYO, S.Sos., M.Si







PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA II
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦁꦏꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPTOYO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

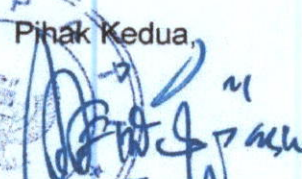
Jabatan : Bupati Gunungkidul

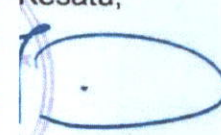
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari 4 April 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

SAPTOYO S.Sos., M.Si.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2026	Indeks	3.90
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2026	Nilai (Kategori)	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah meningkat	1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Indeks	3,89
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	82,50 (A)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 585.383.400,00	DAU
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 881.834.900,00	DAU
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.655.415.274,00	DAU


Wonosari, 4 April 2025

Pihak Kedua,

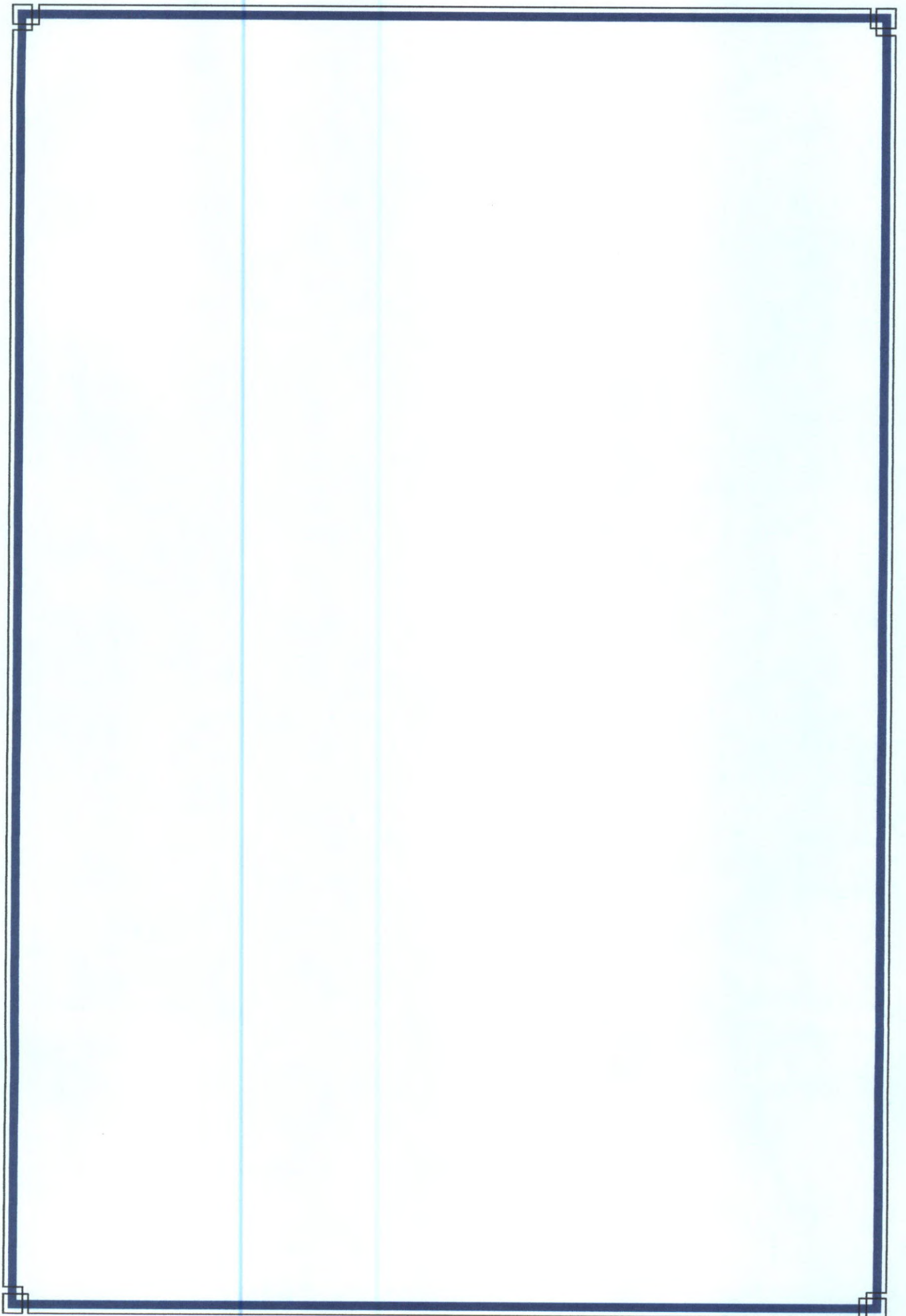


ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,



SAPTOYO S.Sos., M.Si.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦏꦧ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539
Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 Maret 2025

Nomor : 700.1-2.7 /Ev-LKj/18
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta pengawasan penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.8/SKIP/52 tanggal 15 Juli 2024, Inspektorat Daerah telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa nilai sebesar **83,13** dengan predikat **A**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan” yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,34	25,22
2. Pengukuran Kinerja	30	23,89	24,81
3. Pelaporan Kinerja	15	12,94	12,00
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,02	83,13
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Inspektorat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik. Masih terdapat sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, realistic, time bound*) sebagai ukuran keberhasilan strategis. Sasaran Strategis dan indikator kinerja Inspektorat Daerah berupa Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) meningkat kurang tepat, karena sesuai kewenangannya Maturitas Penyelenggaraan SPIP seharusnya menjadi IKU Pemerintah Daerah.
- b. Target Sasaran Strategis Maturitas SPIP yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis karena penetapan target berdasarkan hasil Penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seharusnya berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Hal ini mengakibatkan pencapaian atas target sasaran Strategis Maturitas SPIP kurang optimal.

2. Pengukuran Kinerja

Inspektorat Daerah telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

3. Pelaporan Kinerja

Inspektorat Daerah telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen Perencanaan Kinerja sehingga rumusan tujuan/sasaran dan indikatornya berorientasi *outcome* dan memenuhi kriteria indikator yang SMART pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan.
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen Perencanaan Kinerja sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan.

2. Pengukuran Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

3. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektur menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.


Inspektur,
Sudoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Inspektur Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Gunungkidul

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 4 Juli 2025

Nomor : 700.1.2.7/TL-AKIP/103
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) AKIP Internal Tahun 2024
pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Inspektur 
Saptoyo, S.Sos, M.Si. 
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Surat Inspektur Daerah
 Nomor: 700.1.2.7/TL - AKIP/103
 Tanggal: 4 Juli 2025


**HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024
 PADA INSPEKTORAT DAERAH**

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
	PERENCANAAN KINERJA				
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik. Masih terdapat sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time bound) sebagai ukuran keberhasilan strategis. Sasaran Strategis dan indikator kinerja Inspektorat Daerah berupa Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah Internal (SPIP) meningkat kurang tepat, karena sesuai	Melakukan revidi dan perbaikan dokumen Perencanaan Kinerja sehingga rumusan dan berorientasi outcome dan memenuhi kriteria indikator yang SMART pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan.	Dokumen usulan perubahan rumusan tujuan / sasaran dan indikatornya yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria indikator SMART pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030.	Dokumen usulan perubahan rumusan tujuan / sasaran dan indikatornya yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria indikator SMART pada Rencana Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030.	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
	<p>kewenangannya Maturitas Penyelenggaraan SPIP seharusnya menjadi IKU Pemerintah Daerah.</p>				
	<p>Target Sasaran Strategis Maturitas SPIP yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis karena target penetapan berdasarakan hasil Penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah seharusnya berdasarakan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Hal ini mengakibatkan pencapaian atas target sasaran Strategis Maturitas SPIP kurang optimal.</p>	<p>Melakukan reuiu dan perbaikan dokumen Perencanaan Kinerja sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan.</p>	<p>Usulan Penetapan target dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya pada Rancangan Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030.</p>	<p>usulan perubahan rumusan tujuan/sasaran dan indikatornya yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria indikator SMART pada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi</p>
PENGUKURAN KINERJA					
2.	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-
PELAPORAN KINERJA					
3.	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-

No.	Komponen/Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
4.	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-

Inspektur 

Saptoyo, S.Sos, M.Si. 
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 197103251991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦶꦩꦶꦤꦠꦶꦩꦏꦧꦸꦏꦁꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 16 Juli 2025

Nomor : B/700.1.2.1/289/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas
Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
pada Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024/2025

Yth. Bupati Gunungkidul

di
Wonosari

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024/2025. Adapun hasil penilaian adalah sebagai berikut :

A. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 84/KPTS/TIM/2025 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025;
5. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15/Ev-ITDA/PK.SPIP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2024.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Penjaminan Kualitas bertujuan untuk melakukan penjaminan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

C. Waktu Pelaksanaan

Penjaminan Kualitas dilaksanakan tanggal 23 Juni sampai dengan 21 Juli 2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan terbatas pada Penjaminan Kualitas terhadap Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024/2025.

E. Hasil penugasan

Hasil Penjaminan Kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024/2025 adalah sebagai berikut :

Komponen, Unsur, dan Subunsur	PENILAIAN MANDIRI						PENJAMINAN KUALIAS					
	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN												
Kualitas Sasaran Strategis	5.000	50.00%		2.500			5.000	50.00%		2.500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3.000	50.00%		1.500			3.000	50.00%		1.500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100.00%		4.000				100.00%		4.000		
PENETAPAN TUJUAN			40.00%		1.600				40.00%		1.600	
STRUKTUR DAN PROSES												
Lingkungan Pengendalian												
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.719	3.75%		0.139			3.719	3.75%		0.139		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.750	3.75%		0.141			3.750	3.75%		0.141		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.554	3.75%		0.133			3.554	3.75%		0.133		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	3.75%		0.113			3.000	3.75%		0.113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	3.75%		0.113			3.000	3.75%		0.113		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	PENILAIAN MANDIRI						PENJAMINAN KUALIAS					
	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.833	3.75%		0.144			3.833	3.75%		0.144		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.000	3.75%		0.113			3.000	3.75%		0.113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.000	3.75%		0.113			3.000	3.75%		0.113		
Penilaian Risiko												
Identifikasi Risiko (2.1)	3.333	10.00%		0.333			3.333	10.00%		0.333		
Analisis Risiko (2.2)	3.808	10.00%		0.381			3.758	10.00%		0.376		
Kegiatan Pengendalian												
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4.000	2.27%		0.091			4.000	2.27%		0.091		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	4.000	2.27%		0.091			4.000	2.27%		0.091		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.000	2.27%		0.068			3.000	2.27%		0.068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.000	2.27%		0.068			3.000	2.27%		0.068		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	PENILAIAN MANDIRI						PENJAMINAN KUALIAS					
	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	4.000	2.27%		0.091			4.000	2.27%		0.091		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	2.27%		0.068			3.000	2.27%		0.068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.250	2.27%		0.074			3.250	2.27%		0.074		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3.000	2.27%		0.068			3.000	2.27%		0.068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.000	2.27%		0.068			3.000	2.27%		0.068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.000	2.27%		0.068			3.000	2.27%		0.068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.000	2.27%		0.068			3.000	2.27%		0.068		
Informasi dan Komunikasi												
Informasi yang Relevan (4.1)	3.463	5.00%		0.173			3.525	5.00%		0.176		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	PENILAIAN MANDIRI						PENJAMINAN KUALIAS					
	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.250	5.00%		0.163			3.250	5.00%		0.163		
Pemantauan												
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.333	7.50%		0.250			3.333	7.50%		0.250		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.500	7.50%		0.263			3.500	7.50%		0.263		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3.393						3.391		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30.00%		1.018				30.00%		1.017	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP												
Efektivitas dan Efisiensi												
Capaian <i>Outcome</i>	4.000	20.00%		0.800			4.000	20.00%		0.800		
Capaian <i>Output</i>	4.000	10.00%		0.400			4.000	10.00%		0.400		
Keandalan Laporan Keuangan												
Opini LK	3	25.00%		0.750			3	25.00%		0.750		
Pengamanan atas Aset												
Catatan Pengamanan Aset	3	25.00%		0.750			3	25.00%		0.750		
Ketaatan pada Peraturan												

Komponen, Unsur, dan Subunsur	PENILAIAN MANDIRI						PENJAMINAN KUALIAS						
	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir	
Temuan Ketaatan - BPK	5	20.00%		1.000			5	20.00%		1.000			
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100.00%		3.700				100.00%		3.700			
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30.00%		1.110				30.00%		1.110		
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,728							3,727

Demikian Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024/2025, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,



Saptoyo, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 197103251991011001

Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024/2025



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN
TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120, Telepon 021-85910031 (*hunting*)
E-mail ditwas.takeda@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/S-27/D404/2/2026 20 Januari 2026
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas
Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I

Yth. Para Kepala Perwakilan
di tempat

Dengan ini kami menyampaikan hasil evaluasi dan penjaminan kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I dengan rincian sebagai berikut :

1. APIP Daerah yang dievaluasi pada tahap 1 berjumlah 98 APIP yang terdiri atas 17 APIP Provinsi dan 81 APIP Kab/Kota yang berasal dari 36 Perwakilan BPKP. Perwakilan BPKP telah mengusulkan 24 APIP terdiri atas 6 APIP Provinsi dan 18 APIP Kab/Kota yang berasal dari 14 Perwakilan BPKP untuk dilakukan penjaminan kualitas karena dari hasil evaluasi 24 APIP tersebut mencapai level 3.
2. Selain 24 APIP yang diusulkan Perwakilan BPKP untuk dilakukan penjaminan kualitas, kami juga melaksanakan kalibrasi nilai atas skor APIP dengan kriteria sebagai berikut :
 - APIP dengan skor hasil evaluasi $\geq 2,5$
 - APIP dengan skor hasil evaluasi $< 2,5$ dengan nilai tertimbang elemen 1,00 $> 1,00$
 - APIP dengan skor hasil evaluasi $< 2,5$ dengan nilai tertimbang elemen 2 dan elemen 3 $> 0,5$
 - APIP dengan skor hasil evaluasi $< 2,5$ yang memiliki skor evaluasi diatas skor hasil penjaminan kualitas Evaluasi APIP di wilayah kerja Perwakilan BPKP yang sama
 - APIP dengan capaian level pernyataan $> 3,00$
 - APIP yang selama periode evaluasi terdapat permasalahan hukum (Operasi Tangkap Tangan)

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 46 APIP yang dilakukan kalibrasi nilai atas skor. Kami telah melakukan koreksi skor atas APIP tersebut apabila kondisinya tidak sesuai dengan Perban 6 Tahun 2025.

Hasil menunjukkan penjaminan kualitas seluruh APIP Daerah tidak ada yang mencapai level 3 sehingga dengan demikian seluruh APIP Daerah yang dievaluasi dan dilakukan penjaminan kualitas tahap I seluruhnya berada pada level 2. Rincian skor hasil evaluasi dan penjaminan kualitas terlampir pada lampiran 1. Rincian koreksi skor terlampir pada *link* <https://tinyurl.com/HasilEvaldanQA>. Hasil evaluasi dan penjaminan kualitas selanjutnya akan ditetapkan melalui surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Atas kerjasama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh
Hasoloan Manalu

Tembusan Yth.

1. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor



Rekapitulasi Skor Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I

No	Perwakilan		PK	APIP	EVALUASI							PENJAMINAN KUALITAS						
					SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA	SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA
					E1	E2	E3	E4	E5			E1	E2	E3	E4	E5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20
1	PW01	Aceh	< 2.5	Inspektorat Kab Aceh Barat	1,02	0,44	0,43	0,25	0,23	2,37	2	0,86	0,44	0,43	0,25	0,23	2,21	2
		Aceh	> 2.5	Inspektorat Provinsi Aceh	0,95	0,54	0,52	0,29	0,30	2,60	2	0,85	0,42	0,40	0,29	0,29	2,24	2
		Aceh	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Pidie	1,01	0,39	0,46	0,21	0,25	2,32	2	0,78	0,39	0,40	0,21	0,25	2,03	2
		Aceh	< 2.5	Inspektorat Kota Banda Aceh	0,86	0,51	0,52	0,29	0,28	2,46	2	0,86	0,51	0,40	0,29	0,28	2,34	2
2	PW02	Sumatera Utara	QA	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	1,20	0,60	0,60	0,30	0,32	3,02	3	0,93	0,55	0,40	0,23	0,23	2,34	2
		Sumatera Utara	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Batu bara	1,02	0,60	0,45	0,30	0,30	2,67	2	0,82	0,47	0,40	0,30	0,30	2,28	2
		Sumatera Utara	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang	1,10	0,60	0,60	0,30	0,30	2,90	2	0,88	0,43	0,41	0,30	0,30	2,32	2
		Sumatera Utara	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Langkat	0,80	0,39	0,52	0,30	0,28	2,29	2	0,80	0,39	0,52	0,30	0,28	2,29	2
		Sumatera Utara	> 2.5	Inspektorat Kota Tebing Tinggi	1,20	0,55	0,60	0,28	0,29	2,92	2	0,82	0,43	0,45	0,28	0,29	2,26	2
		Sumatera Utara	> 2.5	Inspektorat Kota Pematangsiantar	1,12	0,60	0,58	0,27	0,30	2,87	2	0,90	0,43	0,48	0,27	0,30	2,38	2
3	PW03	Sumatera Barat	> 2.5	Inspektorat Kota Bukittinggi	0,96	0,50	0,54	0,28	0,29	2,57	2	0,86	0,43	0,49	0,28	0,29	2,35	2
		Sumatera Barat	> 2.5	Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	0,98	0,52	0,55	0,28	0,30	2,63	2	0,80	0,43	0,40	0,28	0,30	2,21	2
		Sumatera Barat	> 2.5	Inspektorat Kota Padang	0,86	0,51	0,54	0,30	0,30	2,51	2	0,86	0,45	0,42	0,30	0,30	2,33	2
4	PW04	Riau	< 2.5	Inspektorat Provinsi Riau	0,82	0,36	0,50	0,29	0,28	2,24	2	0,80	0,36	0,42	0,29	0,27	2,13	2
		Riau	Tidak QA	Inspektorat Daerah Rokan Hilir	0,80	0,38	0,43	0,27	0,27	2,15	2	0,80	0,38	0,43	0,27	0,27	2,15	2
5	PW05	Jambi	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Bungo	0,86	0,53	0,53	0,30	0,24	2,46	2	0,86	0,50	0,53	0,30	0,24	2,44	2
		Jambi	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Tebo	0,98	0,55	0,44	0,30	0,29	2,54	2	0,80	0,45	0,40	0,30	0,29	2,23	2
		Jambi	Tidak QA	Inspektorat Provinsi Jambi	0,85	0,48	0,48	0,25	0,27	2,32	2	0,85	0,48	0,48	0,25	0,27	2,32	2
6	PW06	Bengkulu	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	0,80	0,37	0,42	0,21	0,23	2,03	2	0,80	0,37	0,42	0,21	0,23	2,03	2
		Bengkulu	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan	0,82	0,41	0,42	0,23	0,24	2,13	2	0,82	0,41	0,42	0,23	0,24	2,13	2
7	PW07	Sumatera Selatan	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Muara Enim	0,94	0,56	0,53	0,25	0,27	2,55	2	0,86	0,44	0,40	0,25	0,27	2,22	2
		Sumatera Selatan	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Banyuasin	1,06	0,55	0,45	0,30	0,30	2,65	2	0,83	0,43	0,42	0,30	0,30	2,27	2
8	PW08	Lampung	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Pringsewu	0,74	0,55	0,45	0,27	0,29	2,29	2	0,74	0,53	0,45	0,27	0,29	2,27	2
		Lampung	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	0,80	0,42	0,52	0,24	0,25	2,23	2	0,80	0,42	0,52	0,24	0,25	2,23	2
9	PW09	DKI Jakarta	QA	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	1,20	0,62	0,60	0,33	0,32	3,06	3	0,96	0,56	0,47	0,28	0,29	2,56	2

No	Perwakilan		PK	APIP	EVALUASI						PENJAMINAN KUALITAS							
					SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA	SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA
					E1	E2	E3	E4	E5			E1	E2	E3	E4	E5		
10	PW10	Jawa Barat	Tidak QA	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	0,86	0,40	0,41	0,24	0,22	2,14	2	0,86	0,40	0,41	0,24	0,22	2,14	2
		Jawa Barat	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Bogor	1,00	0,52	0,49	0,30	0,30	2,61	2	0,90	0,45	0,34	0,30	0,30	2,29	2
		Jawa Barat	> 2.5	Inspektorat Kota Sukabumi	1,02	0,56	0,55	0,30	0,29	2,72	2	0,88	0,46	0,52	0,30	0,29	2,45	2
		Jawa Barat	QA	Inspektorat Kabupaten Garut	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	1,04	0,45	0,47	0,26	0,23	2,44	2
		Jawa Barat	QA	Inspektorat Kabupaten Bekasi	1,20	0,60	0,60	0,31	0,30	3,01	3	0,83	0,43	0,47	0,25	0,22	2,20	2
11	PW11	Jawa Tengah	Tidak QA	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	0,86	0,41	0,51	0,28	0,25	2,31	2	0,86	0,41	0,51	0,28	0,25	2,31	2
		Jawa Tengah	> 2.5	Inspektorat Kota Semarang	0,99	0,40	0,52	0,31	0,30	2,53	2	0,89	0,40	0,49	0,30	0,30	2,37	2
		Jawa Tengah	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Banyumas	0,90	0,59	0,47	0,33	0,30	2,60	2	0,82	0,40	0,47	0,31	0,30	2,30	2
		Jawa Tengah	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Temanggung	1,06	0,58	0,53	0,30	0,32	2,78	2	0,84	0,46	0,52	0,30	0,30	2,42	2
		Jawa Tengah	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	0,92	0,45	0,54	0,29	0,30	2,51	2	0,82	0,42	0,49	0,29	0,30	2,33	2
		Jawa Tengah	Tidak QA	Inspektorat Kota Salatiga	0,84	0,40	0,52	0,29	0,29	2,34	2	0,84	0,40	0,52	0,29	0,29	2,34	2
		Jawa Tengah	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Kendal	0,80	0,42	0,47	0,28	0,29	2,26	2	0,80	0,42	0,47	0,28	0,29	2,26	2
12	PW12	DI Yogyakarta	QA	Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1,20	0,64	0,60	0,32	0,34	3,10	3	0,88	0,52	0,40	0,27	0,30	2,37	2
		DI Yogyakarta	QA	Inspektorat Kabupaten Magelang	1,20	0,58	0,60	0,30	0,32	3,00	3	0,80	0,44	0,45	0,28	0,28	2,25	2
		DI Yogyakarta	QA	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	1,20	0,58	0,64	0,35	0,30	3,08	3	0,88	0,46	0,40	0,23	0,26	2,22	2
		DI Yogyakarta	QA	Inspektorat Kota Yogyakarta	1,20	0,61	0,62	0,32	0,31	3,05	3	0,93	0,53	0,42	0,26	0,27	2,40	2
		DI Yogyakarta	QA	Inspektorat Kab Kebumen	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	0,86	0,51	0,40	0,27	0,27	2,31	2
13	PW13	Jawa Timur	QA	Inspektorat Kota Malang	1,28	0,60	0,60	0,30	0,30	3,08	3	0,93	0,57	0,52	0,28	0,27	2,57	2
		Jawa Timur	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Ngawi	0,94	0,57	0,55	0,28	0,30	2,64	2	0,90	0,43	0,40	0,28	0,30	2,31	2
		Jawa Timur	QA	Inspektorat Kota Surabaya	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	0,93	0,57	0,52	0,26	0,28	2,56	2
		Jawa Timur	QA	inspektorat Kabupaten Probolinggo	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	0,93	0,52	0,40	0,27	0,26	2,37	2
		Jawa Timur	QA	Inspektorat Kabupaten Sumenep	1,20	0,60	0,60	0,35	0,35	3,10	3	0,86	0,55	0,40	0,27	0,27	2,36	2
14	PW14	Kalimantan Barat	Tidak QA	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	0,86	0,47	0,52	0,30	0,30	2,45	2	0,86	0,47	0,52	0,30	0,30	2,45	2
		Kalimantan Barat	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Kubu Raya	0,80	0,43	0,43	0,30	0,30	2,26	2	0,80	0,43	0,43	0,30	0,30	2,26	2
		Kalimantan Barat	Tidak QA	Inspektorat Kota Pontianak	0,88	0,47	0,40	0,28	0,29	2,32	2	0,88	0,47	0,40	0,28	0,29	2,32	2
15	PW15	Kalimantan Tengah	QA	Inspektorat Kota Palangka Raya	1,20	0,62	0,60	0,30	0,30	3,02	3	0,80	0,56	0,47	0,22	0,25	2,30	2

No	Perwakilan	PK	APIP	EVALUASI								PENJAMINAN KUALITAS							
				SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA	SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA		
				E1	E2	E3	E4	E5			E1	E2	E3	E4	E5				
		Kalimantan Tengah	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	0,84	0,41	0,39	0,26	0,30	2,19	2	0,84	0,41	0,39	0,26	0,30	2,19	2	
16	PW16	Kalimantan Selatan	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Banjar	0,86	0,41	0,45	0,30	0,30	2,33	2	0,86	0,41	0,45	0,27	0,29	2,29	2	
		Kalimantan Selatan	> 2.5	Inspektorat Kota Banjarbaru	0,93	0,47	0,52	0,30	0,30	2,51	2	0,91	0,39	0,40	0,30	0,30	2,30	2	
		Kalimantan Selatan	< 2.5	Inspektorat Hulu Sungai Selatan	0,86	0,46	0,53	0,28	0,28	2,41	2	0,86	0,46	0,48	0,28	0,28	2,36	2	
17	PW17	Kalimantan Tim	> 2.5	Inspektorat Kota Bontang	1,12	0,59	0,58	0,29	0,29	2,87	2	0,88	0,54	0,52	0,29	0,29	2,51	2	
		Kalimantan Tim	> 2.5	Inspektorat Kota Balikpapan	0,94	0,53	0,54	0,30	0,27	2,59	2	0,90	0,51	0,45	0,30	0,27	2,43	2	
		Kalimantan Tim	> 2.5	Inspektorat Kota Samarinda	1,06	0,55	0,35	0,30	0,29	2,55	2	0,80	0,51	0,35	0,30	0,29	2,25	2	
18	PW18	Sulawesi Utara	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow	0,76	0,32	0,47	0,23	0,23	2,01	2	0,76	0,32	0,47	0,23	0,23	2,01	2	
		Sulawesi Utara	Tidak QA	Inspektorat Kota Tomohon	0,72	0,39	0,53	0,20	0,19	2,04	2	0,72	0,39	0,53	0,20	0,19	2,04	2	
19	PW19	Sulawesi Tengah	QA	Inspektorat Kabupaten Buol	1,20	0,60	0,62	0,34	0,34	3,10	3	0,80	0,53	0,52	0,20	0,23	2,29	2	
		Sulawesi Tengah	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Sigi	0,86	0,46	0,58	0,27	0,27	2,45	2	0,80	0,45	0,43	0,22	0,25	2,15	2	
20	PW20	Sulawesi Tenggara	< 2.5	Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara	0,90	0,48	0,50	0,27	0,30	2,45	2	0,90	0,48	0,45	0,27	0,30	2,40	2	
		Sulawesi Tenggara	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara	0,80	0,41	0,42	0,24	0,25	2,12	2	0,80	0,41	0,42	0,24	0,25	2,12	2	
		Sulawesi Tenggara	Tidak QA	Inspektorat Kota Kendari	0,80	0,40	0,47	0,24	0,26	2,17	2	0,80	0,40	0,47	0,24	0,26	2,17	2	
		Sulawesi Tenggara	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Kolaka	0,80	0,47	0,40	0,23	0,25	2,14	2	0,80	0,47	0,40	0,23	0,25	2,14	2	
21	PW21	Sulawesi Selatan	QA	Inspektorat Kabupaten Bone	1,20	0,58	0,60	0,31	0,31	3,00	3	0,80	0,41	0,40	0,22	0,22	2,05	2	
		Sulawesi Selatan	QA	Inspektorat Kota Makassar	1,02	0,64	0,65	0,35	0,37	3,03	3	0,80	0,45	0,42	0,22	0,22	2,10	2	
22	PW22	Bali	QA	Inspektorat Kota Denpasar	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	0,84	0,51	0,52	0,26	0,28	2,41	2	
		Bali	QA	Inspektorat Kabupaten Badung	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	0,90	0,47	0,50	0,25	0,28	2,40	2	
		Bali	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Gianyar	0,94	0,60	0,60	0,31	0,33	2,78	2	0,88	0,47	0,45	0,30	0,27	2,37	2	
23	PW23	Nusa Tenggara Barat	QA	Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat	1,20	0,56	0,60	0,32	0,32	3,00	3	0,80	0,46	0,40	0,28	0,26	2,20	2	
		Nusa Tenggara Barat	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah	0,86	0,52	0,35	0,30	0,30	2,33	2	0,80	0,52	0,35	0,30	0,30	2,27	2	
		Nusa Tenggara Barat	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Lombok Timur	1,18	0,60	0,55	0,28	0,30	2,92	2	0,80	0,47	0,52	0,26	0,30	2,35	2	

No	Perwakilan		PK	APIP	EVALUASI						PENJAMINAN KUALITAS							
					SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA	SKOR TERTIMBANG					SKOR KAPABILITA	LEVEL KAPABILITA
					E1	E2	E3	E4	E5			E1	E2	E3	E4	E5		
		Nusa Tenggara Barat	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Lombok Utara	0,94	0,42	0,58	0,28	0,23	2,46	2	0,80	0,41	0,52	0,23	0,23	2,19	2
24	PW24	Nusa Tenggara	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat	1,12	0,46	0,52	0,29	0,27	2,66	2	0,80	0,40	0,40	0,29	0,27	2,16	2
		Nusa Tenggara	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur	0,88	0,54	0,52	0,28	0,30	2,52	2	0,84	0,42	0,40	0,28	0,30	2,24	2
		Nusa Tenggara	QA	Inspektorat Kabupaten Alor	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	0,88	0,53	0,50	0,24	0,27	2,43	2
25	PW25	Maluku	QA	Inspektorat Provinsi Maluku	1,20	0,60	0,60	0,30	0,30	3,00	3	0,80	0,40	0,40	0,19	0,22	2,01	2
		Maluku	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah	0,80	0,45	0,42	0,29	0,23	2,19	2	0,80	0,41	0,40	0,29	0,23	2,14	2
26	PW26	Papua	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Merauke	0,80	0,46	0,40	0,25	0,26	2,17	2	0,80	0,46	0,40	0,25	0,26	2,17	2
27	PW27	Papua Barat	QA	Inspektorat Provinsi Papua Barat	1,20	0,59	0,60	0,30	0,32	3,01	3	0,80	0,44	0,40	0,16	0,25	2,05	2
28	PW28	Kepulauan Riau	Tidak QA	Inspektorat Kota Batam	0,86	0,41	0,52	0,27	0,29	2,35	2	0,86	0,41	0,52	0,27	0,29	2,35	2
		Kepulauan Riau	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Karimun	0,78	0,37	0,44	0,27	0,21	2,07	2	0,78	0,37	0,44	0,27	0,21	2,07	2
29	PW29	Bangka Belitung	QA	Inspektorat Kabupaten Belitung	1,28	0,61	0,65	0,30	0,31	3,15	3	0,82	0,45	0,40	0,19	0,25	2,11	2
		Bangka Belitung	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Bangka Tengah	1,06	0,42	0,35	0,29	0,27	2,39	2	0,91	0,42	0,35	0,29	0,27	2,24	2
30	PW30	Banten	> 2.5	Inspektorat Provinsi Banten	1,20	0,53	0,37	0,28	0,28	2,67	2	0,94	0,52	0,35	0,28	0,28	2,37	2
		Banten	Tidak QA	Inspektorat Kota Tangerang Selatan	0,86	0,54	0,50	0,29	0,30	2,49	2	0,86	0,54	0,50	0,29	0,30	2,49	2
31	PW31	Gorontalo	Tidak QA	Inspektorat Provinsi Gorontalo	0,82	0,36	0,38	0,19	0,28	2,02	2	0,82	0,36	0,38	0,19	0,28	2,02	2
		Gorontalo	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara	0,78	0,38	0,42	0,21	0,24	2,04	2	0,78	0,38	0,42	0,21	0,24	2,04	2
32	PW32	Sulawesi Barat	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Mamuju	0,94	0,56	0,50	0,30	0,29	2,59	2	0,80	0,49	0,40	0,30	0,29	2,28	2
		Sulawesi Barat	Tidak QA	Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat	0,94	0,52	0,48	0,26	0,28	2,48	2	0,94	0,52	0,48	0,26	0,28	2,48	2
33	PW33	Maluku Utara	Tidak QA	Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan	0,80	0,42	0,44	0,24	0,27	2,16	2	0,80	0,42	0,44	0,24	0,27	2,16	2
		Maluku Utara	Tidak QA	Inspektorat Kota Ternate	0,89	0,47	0,52	0,24	0,26	2,38	2	0,89	0,47	0,52	0,24	0,26	2,38	2
34	PW34	Kalimantan Utara	< 2.5	Inspektorat Kota Tarakan	0,80	0,50	0,57	0,27	0,28	2,42	2	0,80	0,50	0,52	0,25	0,26	2,34	2
		Kalimantan Utara	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Nunukan	0,86	0,50	0,48	0,27	0,30	2,41	2	0,86	0,49	0,40	0,23	0,27	2,25	2
35	PW35	Papua Barat Daya	< 2.5	Inspektorat Kabupaten Sorong	0,78	0,43	0,57	0,26	0,29	2,34	2	0,78	0,43	0,52	0,26	0,29	2,29	2
36	PW36	Papua Tengah	> 2.5	Inspektorat Kabupaten Paniai	1,02	0,47	0,60	0,28	0,30	2,66	2	0,80	0,40	0,40	0,23	0,27	2,09	2



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 30 Desember 2025
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2025

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

Memperhatikan surat kami nomor PE.09.02/ST-253/D404/01/2025 tanggal 14 Oktober 2025, hal Ekspose Panel Kedeputan atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap I Tahun 2025 dan nomor PE.09.02/ST-255/D404/01/2025 tanggal 15 Oktober 2025 hal Ekspose Panel Kedeputan atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap II Tahun 2025, bersama ini kami menyampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2025, dengan karakteristik terdefinisi sebagai berikut:

No	Nama Pemda	Hasil Evaluasi/Panel SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi *)		
		SPIP	MRI	IEPK
1	Kota Surabaya	3.070	3.006	3.112
2	Kota Denpasar	3.000	3.000	3.000

* SPIP Terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi mensyaratkan SPIP, MRI dan IEPK masing-masing minimal level 3.
Sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP Tahun 2025

Adapun rincian pemerintah daerah yang dievaluasi sebagaimana kami lampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi pada masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Setya Nugraha

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan)
2. Wakil Kepala BPKP (sebagai laporan)
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi BPKP selaku Pembina



**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2025**

No	Nama Provinsi	SPIP Terintegrasi Tahun 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
		SPIP		MRI		IEPK			
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
1	Provinsi Aceh	2.938	2	2.969	2	2.904	2	Tidak	Panel Kedeputian
2	Provinsi Sumatera Utara	2.815	2	2.824	2	1.936	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
3	Provinsi Sumatera Barat	2.945	2	2.800	2	2.354	2	Tidak	Panel Kedeputian
4	Provinsi Riau	2.652	2	2.419	2	1.228	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5	Provinsi Jambi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
6	Provinsi Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
7	Provinsi Sumatera Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
8	Provinsi Lampung	3.200	3	3.073	3	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9	Provinsi DKI Jakarta	2.868	2	2.591	2	2.109	2	Tidak	Panel Kedeputian
10	Provinsi Jawa Barat	3.158	3	3.216	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11	Provinsi Jawa Tengah	2.977	2	2.902	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.080	3	3.031	3	2.574	2	Tidak	Panel Kedeputian
13	Provinsi Jawa Timur	3.490	3	3.389	3	2.990	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14	Provinsi Kalimantan Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
15	Provinsi Kalimantan Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.091	3	2.997	2	2.168	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.288	3	2.975	2	2.037	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
18	Provinsi Sulawesi Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
19	Provinsi Sulawesi Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3.036	3	2.703	2	2.668	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
22	Provinsi Bali	2.931	2	2.991	2	2.810	2	Tidak	Panel Kedeputian
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.667	2	2.659	2	2.630	2	Tidak	Panel Kedeputian
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.032	3	2.909	2	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
25	Provinsi Maluku	2.520	2	2.494	2	2.528	2	Tidak	Panel Kedeputian
26	Provinsi Papua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
27	Provinsi Papua Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
28	Provinsi Kepulauan Riau	2.775	2	2.600	2	2.698	2	Tidak	Panel Kedeputian
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.063	3	3.159	3	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
30	Provinsi Banten	2.973	2	2.928	2	2.399	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31	Provinsi Gorontalo	2.653	2	2.708	2	2.258	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
32	Provinsi Sulawesi Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33	Provinsi Maluku Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.107	3	3.078	3	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

Keterangan	SPIP	%	MRI	%	IEPK	%
Level 5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 3	10	26.32%	6	15.79%	0	0.00%
Level 2	12	31.58%	16	42.11%	20	52.63%
Level 1	0	0.00%	0	0.00%	2	5.26%
N/A	16	42.11%	16	42.11%	16	42.11%
TOTAL	38	100.00%	38	100.00%	38	100.00%
Terdefinisi	0					
Panel Kedeputian	8					
Evaluasi Perwakilan	14					
Total Panel + Evaluasi	22					



**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2025**

No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
1			Provinsi Aceh								
1	PW01	1	Kota Banda Aceh	2.882	2	2.800	2	2.516	2	Tidak	Panel Kedepuitian
2	PW01	2	Kota Langsa	3.018	3	2.991	2	3.176	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
3	PW01	3	Kabupaten Aceh Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
4	PW01	4	Kabupaten Simeulue	3.221	3	3.119	3	2.705	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5	PW01	5	Kabupaten Aceh Tengah	3.029	3	3.016	3	2.952	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
6	PW01	6	Kabupaten Gayo Lues	3.001	3	2.944	2	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
7	PW01	7	Kabupaten Aceh Besar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	PW01	8	Kabupaten Aceh Tamiang	3.147	3	2.994	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9	PW01	9	Kabupaten Aceh Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
10	PW01	10	Kabupaten Aceh Jaya	3.027	3	3.009	3	2.952	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11	PW01	11	Kabupaten Aceh Tenggara	3.009	3	3.016	3	2.760	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12	PW01	12	Kota Sabang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
13	PW01	13	Kota Lhokseumawe	3.037	3	3.059	3	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14	PW01	14	Kabupaten Nagan Raya	3.012	3	2.944	2	2.820	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
15	PW01	15	Kabupaten Aceh Barat Daya	3.090	3	2.967	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
16	PW01	16	Kota Subulussalam	3.051	3	2.796	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
17	PW01	17	Kabupaten Pidie Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
18	PW01	18	Kabupaten Bireuen	3.056	3	3.013	3	2.956	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
19	PW01	19	Kabupaten Bener Meriah	2.805	2	2.806	2	2.410	2	Tidak	Panel Kedepuitian
20	PW01	20	Kabupaten Aceh Utara	3.052	3	2.917	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
21	PW01	21	Kabupaten Aceh Singkil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
22	PW01	22	Kabupaten Pidie	2.938	2	2.772	2	2.672	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
23	PW01	23	Kabupaten Aceh Selatan	3.188	3	3.148	3	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
2			Provinsi Sumatera Utara								
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.942	2	2.977	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
25	PW02	2	Kabupaten Toba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
26	PW02	3	Kota Tebing Tinggi	2.939	2	2.997	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
27	PW02	4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.874	2	2.706	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	2.836	2	2.648	2	2.019	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.753	2	2.489	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
30	PW02	7	Kabupaten Deli Serdang	2.944	2	2.997	2	2.616	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31	PW02	8	Kabupaten Humbang Hasundutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
32	PW02	9	Kota Binjai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33	PW02	10	Kabupaten Dairi	2.792	2	2.438	2	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
34	PW02	11	Kabupaten Karo	2.788	2	2.691	2	2.604	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanbatu	2.598	2	2.388	2	2.186	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
36	PW02	13	Kabupaten Mandailing Natal	2.480	2	2.225	2	1.168	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
37	PW02	14	Kota Pematangsiantar	2.924	2	2.744	2	2.874	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
38	PW02	15	Kota Tanjungbalai	2.879	2	2.888	2	2.856	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
39	PW02	16	Kota Padangsidimpuan	2.874	2	2.766	2	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
40	PW02	17	Kabupaten Serdang Bedagai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
41	PW02	18	Kabupaten Samosir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
42	PW02	19	Kabupaten Batubara	2.734	2	2.891	2	2.426	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
43	PW02	20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2.791	2	2.705	2	2.778	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
44	PW02	21	Kabupaten Padang Lawas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
45	PW02	22	Kabupaten Nias Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
46	PW02	23	Kabupaten Nias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
47	PW02	24	Kabupaten Nias Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
48	PW02	25	Kabupaten Nias Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
49	PW02	26	Kota Gunungsitoli	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
50	PW02	27	Kabupaten Pakpak Bharat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
51	PW02	28	Kota Sibolga	2.731	2	2.753	2	2.462	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
52	PW02	29	Kabupaten Langkat	2.434	2	2.491	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
53	PW02	30	Kabupaten Asahan	2.987	2	2.988	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
54	PW02	31	Kabupaten Simalungun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
55	PW02	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.731	2	2.752	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
56	PW02	33	Kota Medan	2.971	2	2.925	2	2.468	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
3			Provinsi Sumatera Barat								
57	PW03	1	Kabupaten Tanah Datar	2.581	2	2.325	2	2.438	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
58	PW03	2	Kota Padang	2.966	2	2.913	2	2.436	2	Tidak	Panel Kedepuitian
59	PW03	3	Kabupaten Padang Pariaman	2.582	2	2.302	2	2.304	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
60	PW03	4	Kabupaten Pesisir Selatan	2.516	2	2.313	2	2.274	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
61	PW03	5	Kota Bukittinggi	2.942	2	2.731	2	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
62	PW03	6	Kota Payakumbuh	2.917	2	2.691	2	2.628	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
63	PW03	7	Kota Pariaman	2.583	2	2.488	2	2.490	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
64	PW03	8	Kabupaten Dharmasraya	2.682	2	2.378	2	2.328	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
65	PW03	9	Kota Solok	2.781	2	2.764	2	2.754	2	Tidak	Panel Kedepuitian
66	PW03	10	Kabupaten Agam	2.739	2	2.503	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
67	PW03	11	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.757	2	2.645	2	2.472	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
68	PW03	12	Kabupaten Pasaman	2.533	2	2.316	2	2.342	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
69	PW03	13	Kabupaten Solok	2.741	2	2.506	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
70	PW03	14	Kabupaten Sijunjung	2.795	2	2.573	2	2.580	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
71	PW03	15	Kota Sawahlunto	2.754	2	2.566	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
72	PW03	16	Kabupaten Solok Selatan	2.512	2	2.448	2	2.490	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
73	PW03	17	Kabupaten Pasaman Barat	2.581	2	2.511	2	2.470	2	Tidak	Panel Kedepuitan
74	PW03	18	Kota Padang Panjang	2.690	2	2.566	2	2.472	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
75	PW03	19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.735	2	2.481	2	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
4			Provinsi Riau								
76	PW04	1	Kabupaten Kepulauan Meranti	2.563	2	2.502	2	1.818	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
77	PW04	2	Kabupaten Kampar	2.681	2	2.388	2	2.120	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
78	PW04	3	Kabupaten Pelalawan	2.735	2	2.538	2	1.304	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
79	PW04	4	Kabupaten Indragiri Hilir	2.738	2	2.533	2	2.362	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
80	PW04	5	Kabupaten Siak	2.884	2	2.844	2	1.910	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
81	PW04	6	Kabupaten Indragiri Hulu	2.743	2	2.691	2	2.544	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
82	PW04	7	Kota Pekanbaru	2.508	2	2.564	2	1.090	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
83	PW04	8	Kabupaten Rokan Hulu	2.833	2	2.588	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
84	PW04	9	Kabupaten Kuantan Singingi	2.663	2	2.584	2	1.974	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
85	PW04	10	Kota Dumai	2.930	2	2.900	2	3.036	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
86	PW04	11	Kabupaten Rokan Hilir	2.747	2	2.631	2	2.610	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
87	PW04	12	Kabupaten Bengkalis	2.872	2	2.866	2	2.378	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5			Provinsi Jambi								
88	PW05	1	Kabupaten Batanghari	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
89	PW05	2	Kota Sungai Penuh	2.859	2	2.566	2	2.910	2	Tidak	Panel Kedepuitan
90	PW05	3	Kabupaten Bungo	2.794	2	2.800	2	2.000	2	Tidak	Panel Kedepuitan
91	PW05	4	Kota Jambi	2.690	2	2.313	2	2.940	2	Tidak	Panel Kedepuitan
92	PW05	5	Kabupaten Tebo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
93	PW05	6	Kabupaten Merangin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
94	PW05	7	Kabupaten Muaro Jambi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
95	PW05	8	Kabupaten Kerinci	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
96	PW05	9	Kabupaten Sarolangun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
97	PW05	10	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.794	2	2.800	2	2.000	2	Tidak	Panel Kedepuitan
98	PW05	11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
6			Provinsi Bengkulu								
99	PW06	1	Kabupaten Lebong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
100	PW06	2	Kabupaten Bengkulu Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
101	PW06	3	Kabupaten Seluma	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
102	PW06	4	Kabupaten Bengkulu Selatan	2.576	2	2.494	2	2.622	2	Tidak	Panel Kedepuitan
103	PW06	5	Kabupaten Kepahiang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
104	PW06	6	Kabupaten Bengkulu Tengah	2.586	2	2.489	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
105	PW06	7	Kabupaten Kaur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
106	PW06	8	Kota Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
107	PW06	9	Kabupaten Rejang Lebong	2.666	2	2.459	2	2.606	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
108	PW06	10	Kabupaten Mukomuko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
7			Provinsi Sumatera Selatan								
109	PW07	1	Kabupaten Lahat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
110	PW07	2	Kabupaten Muara Enim	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
111	PW07	3	Kabupaten Banyuasin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
112	PW07	4	Kabupaten Musi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
113	PW07	5	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2.735	2	2.488	2	2.868	2	Tidak	Panel Kedepuitan
114	PW07	6	Kabupaten Musi Rawas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
115	PW07	7	Kota Pagar Alam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
116	PW07	8	Kota Lubuk Linggau	3.132	3	2.805	2	2.596	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
117	PW07	9	Kota Palembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
118	PW07	10	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
119	PW07	11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
120	PW07	12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
121	PW07	13	Kabupaten Empat Lawang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
122	PW07	14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
123	PW07	15	Kota Prabumulih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
124	PW07	16	Kabupaten Musi Rawas Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
125	PW07	17	Kabupaten Ogan Ilir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
8			Provinsi Lampung								
126	PW08	1	Kota Metro	3.089	3	2.866	2	2.550	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
127	PW08	2	Kota Bandar Lampung	3.096	3	2.797	2	2.418	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
128	PW08	3	Kabupaten Pesawaran	3.036	3	2.888	2	2.036	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
129	PW08	4	Kabupaten Lampung Selatan	3.165	3	3.009	3	2.820	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
130	PW08	5	Kabupaten Tanggamus	3.095	3	2.809	2	2.490	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
131	PW08	6	Kabupaten Way Kanan	3.087	3	2.908	2	2.524	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
132	PW08	7	Kabupaten Tulang Bawang	3.109	3	2.845	2	2.740	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
133	PW08	8	Kabupaten Lampung Timur	3.150	3	2.959	2	2.748	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025							
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
134	PW08	9	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.025	3	2.998	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
135	PW08	10	Kabupaten Pringsewu	2.813	2	2.515	2	2.342	2	Tidak	Panel Kedepuitan
136	PW08	11	Kabupaten Lampung Tengah	3.173	3	3.014	3	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
137	PW08	13	Kabupaten Lampung Utara	2.751	2	2.769	2	2.310	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
138	PW08	14	Kabupaten Mesuji	2.921	2	2.533	2	2.740	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
139	PW08	12	Kabupaten Lampung Barat	3.189	3	3.034	3	2.840	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
140	PW08	15	Kabupaten Pesisir Barat	3.034	3	2.725	2	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9			Provinsi DKI Jakarta								
10			Provinsi Jawa Barat								
141	PW10	1	Kota Bekasi	3.010	3	2.873	2	2.604	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
142	PW10	2	Kota Banjar	2.548	2	2.400	2	2.798	2	Tidak	Panel Kedepuitan
143	PW10	3	Kabupaten Kuningan	3.045	3	2.947	2	2.734	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
144	PW10	4	Kabupaten Indramayu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
145	PW10	5	Kota Depok	2.642	2	2.552	2	2.682	2	Tidak	Panel Kedepuitan
146	PW10	6	Kabupaten Sumedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
147	PW10	7	Kabupaten Bandung	3.360	3	3.191	3	2.670	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
148	PW10	8	Kabupaten Garut	2.790	2	2.711	2	2.782	2	Tidak	Panel Kedepuitan
149	PW10	9	Kabupaten Sukabumi	3.059	3	3.000	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
150	PW10	10	Kabupaten Bogor	2.818	2	2.766	2	2.532	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
151	PW10	11	Kabupaten Pangandaran	2.705	2	2.650	2	2.266	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
152	PW10	12	Kabupaten Ciamis	3.129	3	3.191	3	2.638	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
153	PW10	13	Kota Bogor	3.194	3	3.150	3	2.934	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
154	PW10	14	Kota Bandung	3.096	3	2.794	2	2.378	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
155	PW10	15	Kabupaten Subang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
156	PW10	16	Kota Cirebon	2.907	2	2.640	2	2.266	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
157	PW10	17	Kota Sukabumi	3.025	3	2.931	2	2.432	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
158	PW10	18	Kabupaten Purwakarta	3.237	3	3.028	3	2.790	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
159	PW10	19	Kabupaten Tasikmalaya	2.892	2	2.644	2	2.436	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
160	PW10	20	Kabupaten Cirebon	2.850	2	2.534	2	2.766	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
161	PW10	21	Kota Tasikmalaya	3.063	3	2.978	2	2.496	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
162	PW10	22	Kabupaten Bekasi	2.722	2	2.694	2	2.262	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
163	PW10	23	Kabupaten Cianjur	2.830	2	2.525	2	2.832	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
164	PW10	24	Kabupaten Karawang	3.090	3	2.981	2	2.508	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
165	PW10	25	Kabupaten Bandung Barat	2.855	2	2.798	2	2.742	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
166	PW10	26	Kabupaten Majalengka	3.076	3	3.006	3	2.532	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
167	PW10	27	Kota Cimahi	3.002	3	3.116	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11			Provinsi Jawa Tengah								
168	PW11	1	Kabupaten Boyolali	2.938	2	2.823	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
169	PW11	2	Kabupaten Karanganyar	3.132	3	2.938	2	2.820	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
170	PW11	3	Kabupaten Kudus	2.948	2	2.830	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
171	PW11	4	Kota Surakarta	3.053	3	2.931	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
172	PW11	5	Kabupaten Pekalongan	2.941	2	2.847	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
173	PW11	6	Kota Semarang	2.799	2	2.531	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
174	PW11	7	Kabupaten Banyumas	2.977	2	2.902	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
175	PW11	8	Kabupaten Blora	2.896	2	2.647	2	2.940	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
176	PW11	9	Kabupaten Pati	2.953	2	2.763	2	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
177	PW11	10	Kabupaten Sragen	2.739	2	2.588	2	2.672	2	Tidak	Panel Kedepuitan
178	PW11	11	Kabupaten Temanggung	2.979	2	2.911	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
179	PW11	12	Kota Pekalongan	2.742	2	2.697	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
180	PW11	13	Kota Salatiga	2.921	2	2.853	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
181	PW11	14	Kabupaten Grobogan	2.974	2	2.905	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
182	PW11	15	Kabupaten Banjarnegara	2.975	2	2.825	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
183	PW11	16	Kabupaten Tegal	2.601	2	2.528	2	2.706	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
184	PW11	17	Kabupaten Kendal	2.756	2	2.572	2	2.832	2	Tidak	Panel Kedepuitan
185	PW11	18	Kabupaten Demak	2.988	2	2.938	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
186	PW11	19	Kabupaten Wonogiri	2.963	2	2.816	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
187	PW11	20	Kabupaten Batang	2.584	2	2.519	2	2.814	2	Tidak	Panel Kedepuitan
188	PW11	21	Kabupaten Pemalang	2.930	2	2.734	2	2.730	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
189	PW11	22	Kabupaten Sukoharjo	2.794	2	2.650	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
190	PW11	23	Kabupaten Wonosobo	2.867	2	2.775	2	2.788	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
191	PW11	24	Kabupaten Semarang	2.776	2	2.666	2	2.676	2	Tidak	Panel Kedepuitan
192	PW11	25	Kabupaten Purbalingga	3.174	3	2.981	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
193	PW11	26	Kabupaten Rembang	2.978	2	2.911	2	2.742	2	Tidak	Panel Kedepuitan
194	PW11	27	Kabupaten Brebes	2.825	2	2.666	2	2.784	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
195	PW11	28	Kota Tegal	2.765	2	2.509	2	2.706	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
196	PW11	29	Kabupaten Jepara	2.965	2	2.897	2	2.734	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12			Provinsi DI Yogyakarta								
197	PW12	1	Kabupaten Purworejo	3.320	3	3.098	3	2.670	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
198	PW12	2	Kabupaten Cilacap	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
199	PW12	3	Kabupaten Bantul	3.216	3	3.225	3	2.664	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
200	PW12	4	Kota Magelang	2.828	2	2.559	2	2.760	2	Tidak	Panel Kedepuitan
201	PW12	5	Kabupaten Magelang	3.156	3	3.325	3	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
202	PW12	6	Kabupaten Gunungkidul	3.072	3	2.838	2	2.584	2	Tidak	Panel Kedepuitan
203	PW12	7	Kabupaten Sleman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
204	PW12	8	Kabupaten Kebumen	2.695	2	2.573	2	2.600	2	Tidak	Panel Kedepuitan
205	PW12	9	Kabupaten Klaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
206	PW12	10	Kabupaten Kulon Progo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
207	PW12	11	Kota Yogyakarta	3.399	3	3.369	3	2.752	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
13			Provinsi Jawa Timur								
208	PW13	1	Kabupaten Banyuwangi	3.131	3	3.072	3	2.722	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
209	PW13	2	Kota Surabaya	3.070	3	3.006	3	3.112	3	Ya	Panel Kedepuitan
210	PW13	3	Kabupaten Bojonegoro	3.201	3	2.968	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
211	PW13	4	Kabupaten Bondowoso	2.448	2	2.017	2	1.551	1	Tidak	Panel Kedepuitan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025							
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
212	PW13	5	Kabupaten Jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
213	PW13	6	Kabupaten Lumajang	3.150	3	3.105	3	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
214	PW13	7	Kabupaten Pacitan	2.772	2	2.731	2	2.670	2	Tidak	Panel Kedepuitan
215	PW13	8	Kabupaten Pasuruan	3.032	3	2.961	2	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
216	PW13	9	Kabupaten Ponorogo	2.821	2	2.693	2	2.158	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
217	PW13	10	Kabupaten Probolinggo	2.524	2	2.030	2	1.616	1	Tidak	Panel Kedepuitan
218	PW13	11	Kabupaten Tulungagung	2.929	2	2.791	2	2.670	2	Tidak	Panel Kedepuitan
219	PW13	12	Kota Blitar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
220	PW13	13	Kota Mojokerto	3.257	3	3.152	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
221	PW13	14	Kota Malang	3.068	3	3.031	3	2.766	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
222	PW13	15	Kabupaten Blitar	3.287	3	2.978	2	2.524	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
223	PW13	16	Kabupaten Lamongan	2.935	2	2.741	2	2.802	2	Tidak	Panel Kedepuitan
224	PW13	17	Kabupaten Situbondo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
225	PW13	18	Kota Probolinggo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
226	PW13	19	Kota Kediri	2.964	2	2.881	2	2.646	2	Tidak	Panel Kedepuitan
227	PW13	20	Kabupaten Gresik	3.343	3	2.997	2	2.430	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
228	PW13	21	Kabupaten Kediri	2.882	2	2.570	2	2.592	2	Tidak	Panel Kedepuitan
229	PW13	22	Kabupaten Sidoarjo	3.265	3	2.952	2	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
230	PW13	23	Kabupaten Pamekasan	3.046	3	3.041	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
231	PW13	24	Kabupaten Sumenep	3.127	3	3.028	3	2.464	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
232	PW13	25	Kota Madiun	3.289	3	3.063	3	2.736	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
233	PW13	26	Kabupaten Magetan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
234	PW13	27	Kabupaten Trenggalek	3.101	3	2.809	2	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
235	PW13	28	Kabupaten Ngawi	3.240	3	3.156	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
236	PW13	29	Kabupaten Tuban	3.200	3	2.995	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
237	PW13	30	Kabupaten Madiun	3.290	3	3.073	3	2.706	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
238	PW13	31	Kota Pasuruan	3.167	3	3.028	3	2.670	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
239	PW13	32	Kota Batu	3.178	3	3.069	3	2.482	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
240	PW13	33	Kabupaten Nganjuk	3.199	3	3.194	3	2.918	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
241	PW13	34	Kabupaten Jember	3.008	3	2.813	2	2.580	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
242	PW13	35	Kabupaten Sampang	3.219	3	3.056	3	2.970	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
243	PW13	36	Kabupaten Mojokerto	3.245	3	3.125	3	2.984	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
244	PW13	37	Kabupaten Malang	3.175	3	3.169	3	2.080	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
245	PW13	38	Kabupaten Bangkalan	3.130	3	2.925	2	2.340	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14			Provinsi Kalimantan Barat								
246	PW14	1	Kota Pontianak	3.337	3	3.019	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
247	PW14	2	Kabupaten Landak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
248	PW14	3	Kabupaten Sintang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
249	PW14	4	Kabupaten Sanggau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
250	PW14	5	Kabupaten Kubu Raya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
251	PW14	6	Kota Singkawang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
252	PW14	7	Kabupaten Mempawah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
253	PW14	8	Kabupaten Sekadau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
254	PW14	9	Kabupaten Ketapang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
255	PW14	10	Kabupaten Kapuas Hulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
256	PW14	11	Kabupaten Melawi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
257	PW14	12	Kabupaten Kayong Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
258	PW14	13	Kabupaten Bengkayang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
259	PW14	14	Kabupaten Sambas	3.070	3	2.913	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
15			Provinsi Kalimantan Tengah								
260	PW15	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
261	PW15	2	Kabupaten Kotawaringin Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
262	PW15	3	Kabupaten Lamandau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
263	PW15	4	Kota Palangka Raya	2.679	2	2.777	2	2.526	2	Tidak	Panel Kedepuitan
264	PW15	5	Kabupaten Pulang Pisau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
265	PW15	6	Kabupaten Barito Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
266	PW15	7	Kabupaten Gunung Mas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
267	PW15	8	Kabupaten Barito Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
268	PW15	9	Kabupaten Barito Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
269	PW15	10	Kabupaten Sukamara	2.868	2	2.659	2	2.772	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
270	PW15	11	Kabupaten Kapuas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
271	PW15	12	Kabupaten Murung Raya	2.859	2	2.653	2	2.616	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
272	PW15	13	Kabupaten Katingan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
273	PW15	14	Kabupaten Seruyan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
16			Provinsi Kalimantan Selatan								
274	PW16	1	Kabupaten Banjar	3.095	3	2.906	2	2.830	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
275	PW16	2	Kota Banjarmasin	3.070	3	2.969	2	3.080	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
276	PW16	3	Kota Banjarbaru	3.105	3	3.034	3	2.546	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
277	PW16	4	Kabupaten Tabalong	3.073	3	2.963	2	2.600	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
278	PW16	5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.182	3	2.884	2	2.876	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
279	PW16	6	Kabupaten Balangan	3.154	3	3.053	3	2.832	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
280	PW16	7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.259	3	3.272	3	2.642	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
281	PW16	8	Kabupaten Tapin	3.053	3	3.000	3	2.742	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
282	PW16	9	Kabupaten Tanah Bumbu	3.011	3	2.797	2	2.736	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
283	PW16	10	Kabupaten Kotabaru	3.017	3	2.519	2	2.104	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
284	PW16	11	Kabupaten Tanah Laut	3.149	3	3.106	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
285	PW16	12	Kabupaten Barito Kuala	2.423	2	2.219	2	2.598	2	Tidak	Panel Kedepuitan
286	PW16	13	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2.709	2	2.656	2	2.688	2	Tidak	Panel Kedepuitan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025																	
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi										
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level												
17			Provinsi Kalimantan Timur																		
287	PW17	1	Kota Bontang	3.177	3	3.100	3	2.832	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
288	PW17	2	Kota Samarinda	3.214	3	3.102	3	2.658	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
289	PW17	3	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.391	2	2.409	2	1.000	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
290	PW17	4	Kabupaten Berau	3.187	3	3.155	3	2.532	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
291	PW17	5	Kabupaten Kutai Barat	2.618	2	2.316	2	2.682	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
292	PW17	6	Kabupaten Kutai Timur	2.714	2	2.625	2	2.145	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
293	PW17	7	Kabupaten Paser	3.191	3	3.177	3	2.514	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
294	PW17	8	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.920	2	2.928	2	2.478	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
295	PW17	9	Kota Balikpapan	3.018	3	3.020	3	2.730	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
296	PW17	10	Kabupaten Mahakam Ulu	2.882	2	2.691	2	2.328	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
18			Provinsi Sulawesi Utara																		
297	PW18	1	Kota Manado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
298	PW18	2	Kota Kotamobagu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
299	PW18	3	Kabupaten Kepulauan Talaud	2.823	2	2.767	2	2.766	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
300	PW18	4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
301	PW18	5	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2.414	2	2.113	2	2.168	2	Tidak	Panel Kedepuitan										
302	PW18	6	Kabupaten Minahasa Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
303	PW18	7	Kota Tomohon	2.398	2	2.116	2	2.814	2	Tidak	Panel Kedepuitan										
304	PW18	8	Kabupaten Kepulauan Sangihe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
305	PW18	9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
306	PW18	10	Kabupaten Minahasa Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
307	PW18	11	Kabupaten Minahasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
308	PW18	12	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
309	PW18	13	Kabupaten Bolaang Mongondow	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
310	PW18	14	Kota Bitung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
311	PW18	15	Kabupaten Minahasa Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
19			Provinsi Sulawesi Tengah																		
312	PW19	1	Kota Palu	2.372	2	2.347	2	2.514	2	Tidak	Panel Kedepuitan										
313	PW19	2	Kabupaten Tojo Una Una	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
314	PW19	3	Kabupaten Poso	3.031	3	3.005	3	2.580	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
315	PW19	4	Kabupaten Buol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
316	PW19	5	Kabupaten Banggai Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
317	PW19	6	Kabupaten Morowali	2.820	2	2.925	2	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
318	PW19	7	Kabupaten Banggai	2.725	2	2.503	2	2.464	2	Tidak	Panel Kedepuitan										
319	PW19	8	Kabupaten Parigi Moutong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
320	PW19	9	Kabupaten Banggai Kepulauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
321	PW19	10	Kabupaten Donggala	2.687	2	2.844	2	2.568	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
322	PW19	11	Kabupaten Morowali Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
323	PW19	12	Kabupaten Tolitoli	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
324	PW19	13	Kabupaten Sigi	3.102	3	3.231	3	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
20			Provinsi Sulawesi Tenggara																		
325	PW20	1	Kota Baubau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
326	PW20	2	Kabupaten Konawe Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
327	PW20	3	Kabupaten Kolaka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
328	PW20	4	Kabupaten Bombana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
329	PW20	5	Kota Kendari	2.732	2	2.745	2	2.862	2	Tidak	Panel Kedepuitan										
330	PW20	6	Kabupaten Buton	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
331	PW20	7	Kabupaten Wakatobi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
332	PW20	8	Kabupaten Kolaka Utara	2.927	2	2.813	2	2.126	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
333	PW20	9	Kabupaten Muna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
334	PW20	10	Kabupaten Buton Tengah	2.602	2	2.263	2	2.460	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
335	PW20	11	Kabupaten Konawe Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
336	PW20	12	Kabupaten Konawe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
337	PW20	13	Kabupaten Muna Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
338	PW20	14	Kabupaten Buton Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
339	PW20	15	Kabupaten Konawe Kepulauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
340	PW20	16	Kabupaten Kolaka Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
341	PW20	17	Kabupaten Buton Selatan	2.963	2	2.861	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
21			Provinsi Sulawesi Selatan																		
342	PW21	1	Kabupaten Pinrang	3.007	3	2.981	2	2.868	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
343	PW21	2	Kabupaten Luwu Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
344	PW21	3	Kota Makassar	3.011	3	2.889	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
345	PW21	4	Kabupaten Toraja Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
346	PW21	5	Kabupaten Soppeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
347	PW21	6	Kabupaten Gowa	2.773	2	2.719	2	2.526	2	Tidak	Panel Kedepuitan										
348	PW21	7	Kabupaten Luwu Timur	3.183	3	2.894	2	2.874	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										
349	PW21	8	Kabupaten Bulukumba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi										
350	PW21	9	Kabupaten Wajo	3.090	3	2.978	2	2.718	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan										



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
351	PW21	10	Kota Palopo	3.191	3	2.541	2	2.060	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
352	PW21	11	Kabupaten Sidenreng Rappang	3.011	3	2.773	2	2.830	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
353	PW21	12	Kabupaten Bantaeng	3.155	3	2.572	2	2.156	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
354	PW21	13	Kabupaten Luwu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
355	PW21	14	Kabupaten Maros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
356	PW21	15	Kabupaten Enrekang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
357	PW21	16	Kabupaten Barru	3.091	3	2.950	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
358	PW21	17	Kabupaten Jeneponto	2.652	2	2.244	2	2.136	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
359	PW21	18	Kabupaten Kep. Selayar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
360	PW21	19	Kabupaten Sinjai	2.985	2	2.972	2	2.976	2	Tidak	Panel Ke deputian
361	PW21	20	Kabupaten Takalar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
362	PW21	21	Kabupaten Tana Toraja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
363	PW21	22	Kota Parepare	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
364	PW21	23	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3.105	3	3.011	3	2.640	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
365	PW21	24	Kabupaten Bone	3.099	3	3.027	3	3.000	3	Ya	Evaluasi Perwakilan
22			Provinsi Bali								
366	PW22	1	Kabupaten Badung	3.156	3	3.017	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
367	PW22	2	Kabupaten Gianyar	3.099	3	3.059	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
368	PW22	3	Kota Denpasar	3.000	3	3.000	3	3.000	3	Ya	Panel Ke deputian
369	PW22	4	Kabupaten Tabanan	3.018	3	3.003	3	2.874	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
370	PW22	5	Kabupaten Karangasem	3.003	3	2.794	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
371	PW22	6	Kabupaten Klungkung	3.096	3	3.016	3	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
372	PW22	7	Kabupaten Bangli	3.067	3	2.956	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
373	PW22	8	Kabupaten Jembrana	2.733	2	2.548	2	2.652	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
374	PW22	9	Kabupaten Buleleng	3.038	3	2.752	2	2.814	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
23			Provinsi Nusa Tenggara Barat								
375	PW23	1	Kabupaten Lombok Tengah	3.183	3	3.109	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
376	PW23	2	Kota Mataram	2.653	2	2.673	2	2.808	2	Tidak	Panel Ke deputian
377	PW23	3	Kabupaten Sumbawa Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
378	PW23	4	Kabupaten Sumbawa	2.728	2	2.472	2	2.652	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
379	PW23	5	Kabupaten Bima	3.009	3	2.897	2	2.518	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
380	PW23	6	Kabupaten Lombok Utara	3.062	3	2.939	2	2.868	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
381	PW23	7	Kota Bima	2.920	2	2.798	2	2.458	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
382	PW23	8	Kabupaten Dompu	2.460	2	2.061	2	2.556	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
383	PW23	9	Kabupaten Lombok Barat	2.543	2	2.478	2	2.910	2	Tidak	Panel Ke deputian
384	PW23	10	Kabupaten Lombok Timur	3.148	3	2.981	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
24			Provinsi Nusa Tenggara Timur								
385	PW24	1	Kabupaten Sikka	2.437	2	2.097	2	1.000	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
386	PW24	2	Kabupaten Sumba Timur	2.921	2	2.638	2	2.366	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
387	PW24	3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
388	PW24	4	Kabupaten Belu	2.966	2	2.694	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
389	PW24	5	Kabupaten Flores Timur	2.695	2	2.375	2	2.348	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
390	PW24	6	Kabupaten Alor	2.939	2	2.700	2	2.742	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
391	PW24	7	Kabupaten Ende	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
392	PW24	8	Kabupaten Kupang	2.051	2	1.616	1	2.326	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
393	PW24	9	Kabupaten Lembata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
394	PW24	10	Kabupaten Manggarai	2.824	2	2.448	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
395	PW24	11	Kabupaten Ngada	2.491	2	2.230	2	1.176	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
396	PW24	12	Kabupaten Sumba Barat	2.050	2	1.644	1	1.742	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
397	PW24	13	Kota Kupang	2.197	2	1.931	1	1.000	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
398	PW24	14	Kabupaten Rote Ndao	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
399	PW24	15	Kabupaten Nagekeo	2.578	2	2.150	2	2.382	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
400	PW24	16	Kabupaten Sumba Barat Daya	2.335	2	1.956	1	1.534	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
401	PW24	17	Kabupaten Sumba Tengah	2.331	2	1.969	1	1.634	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
402	PW24	18	Kabupaten Manggarai Timur	2.874	2	2.450	2	2.070	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
403	PW24	19	Kabupaten Malaka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
404	PW24	20	Kabupaten Timor Tengah Utara	2.357	2	2.094	2	2.466	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
405	PW24	21	Kabupaten Manggarai Barat	3.020	3	2.830	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
406	PW24	22	Kabupaten Sabu Raijua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
25			Provinsi Maluku								
407	PW25	1	Kota Ambon	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
408	PW25	2	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
409	PW25	3	Kabupaten Maluku Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
410	PW25	4	Kabupaten Maluku Tengah	2.548	2	2.413	2	2.548	2	Tidak	Panel Ke deputian
411	PW25	5	Kota Tual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
412	PW25	6	Kabupaten Seram Bagian Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
413	PW25	7	Kabupaten Maluku Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
414	PW25	8	Kabupaten Buru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
415	PW25	9	Kabupaten Seram Bagian Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025							
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
416	PW25	10	Kabupaten Kepulauan Aru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
417	PW25	11	Kabupaten Buru Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
26			Provinsi Papua								
418	PW26	1	Kabupaten Merauke	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
419	PW26	2	Kota Jayapura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
420	PW26	4	Kabupaten Lanny Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
421	PW26	6	Kabupaten Jayapura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
422	PW26	8	Kabupaten Asmat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
423	PW26	9	Kabupaten Kep. Yapen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
424	PW26	10	Kabupaten Keerom	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
425	PW26	11	Kabupaten Supiori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
426	PW26	12	Kabupaten Jayawijaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
427	PW26	13	Kabupaten Yahukimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
428	PW26	14	Kabupaten Tolikara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
429	PW26	15	Kabupaten Yalimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
430	PW26	16	Kabupaten Nduga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
431	PW26	18	Kabupaten Peg. Bintang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
432	PW26	19	Kabupaten Waropen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
433	PW26	20	Kabupaten Sarmi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
434	PW26	21	Kabupaten Biak Numfor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
435	PW26	24	Kabupaten Boven Digoel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
436	PW26	25	Kabupaten Mappi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
437	PW26	26	Kabupaten Mamberamo Raya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
438	PW26	27	Kabupaten Mamberamo Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
27			Provinsi Papua Barat								
439	PW27	1	Kabupaten Teluk Bintuni	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
440	PW27	2	Kabupaten Teluk Wondama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
441	PW27	3	Kabupaten Manokwari Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
442	PW27	4	Kabupaten Pegunungan Arfak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
443	PW27	5	Kabupaten Fakfak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
444	PW27	6	Kabupaten Manokwari	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
445	PW27	7	Kabupaten Kaimana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
28			Provinsi Kepulauan Riau								
446	PW28	1	Kota Tanjungpinang	2.780	2	2.673	2	2.766	2	Tidak	Panel Kedepuitan
447	PW28	2	Kabupaten Karimun	2.686	2	2.600	2	2.778	2	Tidak	Panel Kedepuitan
448	PW28	3	Kabupaten Bintan	2.566	2	2.475	2	2.536	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
449	PW28	4	Kota Batam	2.643	2	2.498	2	2.748	2	Tidak	Panel Kedepuitan
450	PW28	5	Kabupaten Kepulauan Anambas	2.444	2	2.120	2	2.148	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
451	PW28	6	Kabupaten Lingga	2.560	2	2.489	2	2.694	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
452	PW28	7	Kabupaten Natuna	2.950	2	2.903	2	2.676	2	Tidak	Panel Kedepuitan
29			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								
453	PW29	1	Kabupaten Bangka Tengah	2.898	2	2.656	2	2.436	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
454	PW29	2	Kabupaten Bangka	2.856	2	2.867	2	2.702	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
455	PW29	3	Kabupaten Belitung	2.449	2	2.448	2	2.702	2	Tidak	Panel Kedepuitan
456	PW29	4	Kabupaten Belitung Timur	2.468	2	2.495	2	2.702	2	Tidak	Panel Kedepuitan
457	PW29	5	Kabupaten Bangka Barat	2.310	2	1.950	1	1.846	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
458	PW29	6	Kota Pangkalpinang	2.678	2	2.800	2	2.526	2	Tidak	Panel Kedepuitan
459	PW29	7	Kabupaten Bangka Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
30			Provinsi Banten								
460	PW30	1	Kabupaten Serang	3.023	3	2.991	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
461	PW30	2	Kota Tangerang	3.119	3	3.088	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
462	PW30	3	Kota Tangerang Selatan	3.180	3	2.920	2	3.096	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
463	PW30	4	Kabupaten Tangerang	2.600	2	2.575	2	2.580	2	Tidak	Panel Kedepuitan
464	PW30	5	Kabupaten Lebak	3.006	3	2.956	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
465	PW30	6	Kabupaten Pandeglang	3.152	3	3.063	3	2.656	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
466	PW30	7	Kota Cilegon	2.453	2	2.406	2	2.330	2	Tidak	Panel Kedepuitan
467	PW30	8	Kota Serang	2.903	2	2.800	2	2.119	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31			Provinsi Gorontalo								
468	PW31	1	Kabupaten Gorontalo	2.712	2	2.462	2	1.483	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
469	PW31	2	Kota Gorontalo	2.367	2	1.954	1	1.620	1	Tidak	Panel Kedepuitan
470	PW31	3	Kabupaten Pohuwato	2.813	2	2.667	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
471	PW31	4	Kabupaten Bone Bolango	2.972	2	2.891	2	2.496	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
472	PW31	5	Kabupaten Boalemo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
473	PW31	6	Kabupaten Gorontalo Utara	2.900	2	2.659	2	1.864	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
32			Provinsi Sulawesi Barat								
474	PW32	1	Kabupaten Majene	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
475	PW32	2	Kabupaten Mamuju	3.181	3	2.877	2	2.464	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
476	PW32	3	Kabupaten Polewali Mandar	2.914	2	2.897	2	2.446	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
477	PW32	4	Kabupaten Pasangkayu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
478	PW32	5	Kabupaten Mamasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
479	PW32	6	Kabupaten Mamuju Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33			Provinsi Maluku Utara								
480	PW33	1	Kabupaten Halmahera Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025								
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level			
481	PW33	2	Kota Tidore Kepulauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
482	PW33	3	Kabupaten Halmahera Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
483	PW33	4	Kabupaten Pulau Taliabu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
484	PW33	5	Kabupaten Halmahera Barat	2.506	2	2.475	2	2.646	2	Tidak		Panel Kedepuitian
485	PW33	6	Kabupaten Kepulauan Sula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
486	PW33	7	Kabupaten Halmahera Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
487	PW33	8	Kabupaten Pulau Morotai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
488	PW33	9	Kabupaten Halmahera Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
489	PW33	10	Kota Ternate	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
34			Provinsi Kalimantan Utara									
490	PW34	1	Kabupaten Nunukan	3.168	3	2.970	2	2.549	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
491	PW34	2	Kabupaten Malinau	3.094	3	2.903	2	2.634	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
492	PW34	3	Kota Tarakan	2.725	2	2.434	2	2.730	2	Tidak		Panel Kedepuitian
493	PW34	4	Kabupaten Bulungan	3.174	3	3.250	3	2.964	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
494	PW34	5	Kabupaten Tana Tidung	3.138	3	3.194	3	2.402	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
35			Provinsi Papua Barat Daya									
495	PW35	1	Kabupaten Sorong	2.287	2	2.216	2	2.300	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
496	PW35	2	Kota Sorong	1.845	1	1.413	1	2.144	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
497	PW35	3	Kabupaten Sorong Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
498	PW35	4	Kabupaten Raja Ampat	2.412	2	2.091	2	2.246	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
499	PW35	5	Kabupaten Tambrauw	2.219	2	1.988	1	1.392	1	Tidak		Evaluasi Perwakilan
500	PW35	6	Kabupaten Maybrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
36			Provinsi Papua Tengah									
501	PW36	1	Kabupaten Nabire	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
502	PW36	2	Kabupaten Puncak Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
503	PW36	3	Kabupaten Intan Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
504	PW36	4	Kabupaten Puncak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
505	PW36	5	Kabupaten Mimika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
506	PW36	6	Kabupaten Paniai	2.271	2	2.040	2	2.394	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
507	PW36	7	Kabupaten Dogiyai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
508	PW36	8	Kabupaten Deiyai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

Keterangan	SPIP	%	MRI	%	IEPK	%
Level 5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 3	126	24.80%	62	12.20%	12	2.36%
Level 2	186	36.61%	242	47.63%	281	55.31%
Level 1	1	0.20%	9	1.77%	20	3.94%
N/A	195	38.39%	195	38.39%	195	38.38%
TOTAL	508	100.00%	508	100.00%	508	100.00%
Terdefinisi			2			
Panel Kedepuitian			56			
Evaluasi Perwakilan			257			
Total Panel + Evaluasi			313			





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.04/S-456/D4/04/2025 30 Desember 2025
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi Tahun 2025

Yth. Para Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

Memperhatikan surat kami nomor PE.09.02/ST-253/D404/01/2025 tanggal 14 Oktober 2025, hal Ekspose Panel Kedeputan atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap I Tahun 2025 dan nomor PE.09.02/ST-255/D404/01/2025 tanggal 15 Oktober 2025 hal Ekspose Panel Kedeputan atas Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Daerah Tahap II Tahun 2025, bersama ini kami menyampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi 2025, dengan karakteristik terdefinisi sebagai berikut:

No	Nama Pemda	Hasil Evaluasi/Panel SPIP Terintegrasi dengan Karakteristik Berbasis Terdefinisi *)		
		SPIP	MRI	IEPK
1	Kota Surabaya	3.070	3.006	3.112
2	Kota Denpasar	3.000	3.000	3.000

* SPIP Terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi mensyaratkan SPIP, MRI dan IEPK masing-masing minimal level 3.
Sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP Tahun 2025

Adapun rincian pemerintah daerah yang dievaluasi sebagaimana kami lampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini.

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi pada masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Deputi,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Setya Nugraha

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan)
2. Wakil Kepala BPKP (sebagai laporan)
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi BPKP selaku Pembina



**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2025**

No	Nama Provinsi	SPIP Terintegrasi Tahun 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
		SPIP		MRI		IEPK			
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
1	Provinsi Aceh	2.938	2	2.969	2	2.904	2	Tidak	Panel Kedeputian
2	Provinsi Sumatera Utara	2.815	2	2.824	2	1.936	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
3	Provinsi Sumatera Barat	2.945	2	2.800	2	2.354	2	Tidak	Panel Kedeputian
4	Provinsi Riau	2.652	2	2.419	2	1.228	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5	Provinsi Jambi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
6	Provinsi Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
7	Provinsi Sumatera Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
8	Provinsi Lampung	3.200	3	3.073	3	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9	Provinsi DKI Jakarta	2.868	2	2.591	2	2.109	2	Tidak	Panel Kedeputian
10	Provinsi Jawa Barat	3.158	3	3.216	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11	Provinsi Jawa Tengah	2.977	2	2.902	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.080	3	3.031	3	2.574	2	Tidak	Panel Kedeputian
13	Provinsi Jawa Timur	3.490	3	3.389	3	2.990	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14	Provinsi Kalimantan Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
15	Provinsi Kalimantan Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.091	3	2.997	2	2.168	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.288	3	2.975	2	2.037	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
18	Provinsi Sulawesi Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
19	Provinsi Sulawesi Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3.036	3	2.703	2	2.668	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
22	Provinsi Bali	2.931	2	2.991	2	2.810	2	Tidak	Panel Kedeputian
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.667	2	2.659	2	2.630	2	Tidak	Panel Kedeputian
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.032	3	2.909	2	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
25	Provinsi Maluku	2.520	2	2.494	2	2.528	2	Tidak	Panel Kedeputian
26	Provinsi Papua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
27	Provinsi Papua Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
28	Provinsi Kepulauan Riau	2.775	2	2.600	2	2.698	2	Tidak	Panel Kedeputian
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.063	3	3.159	3	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
30	Provinsi Banten	2.973	2	2.928	2	2.399	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31	Provinsi Gorontalo	2.653	2	2.708	2	2.258	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
32	Provinsi Sulawesi Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33	Provinsi Maluku Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.107	3	3.078	3	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
35	Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
36	Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
37	Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
38	Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

Keterangan	SPIP	%	MRI	%	IEPK	%
Level 5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 3	10	26.32%	6	15.79%	0	0.00%
Level 2	12	31.58%	16	42.11%	20	52.63%
Level 1	0	0.00%	0	0.00%	2	5.26%
N/A	16	42.11%	16	42.11%	16	42.11%
TOTAL	38	100.00%	38	100.00%	38	100.00%
Terdefinisi	0					
Panel Kedeputian	8					
Evaluasi Perwakilan	14					
Total Panel + Evaluasi	22					



**PENETAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA TAHUN 2025**

No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
			Provinsi Aceh								
1	PW01	1	Kota Banda Aceh	2.882	2	2.800	2	2.516	2	Tidak	Panel Kedepuitian
2	PW01	2	Kota Langsa	3.018	3	2.991	2	3.176	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
3	PW01	3	Kabupaten Aceh Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
4	PW01	4	Kabupaten Simeulue	3.221	3	3.119	3	2.705	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5	PW01	5	Kabupaten Aceh Tengah	3.029	3	3.016	3	2.952	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
6	PW01	6	Kabupaten Gayo Lues	3.001	3	2.944	2	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
7	PW01	7	Kabupaten Aceh Besar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	PW01	8	Kabupaten Aceh Tamiang	3.147	3	2.994	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9	PW01	9	Kabupaten Aceh Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
10	PW01	10	Kabupaten Aceh Jaya	3.027	3	3.009	3	2.952	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11	PW01	11	Kabupaten Aceh Tenggara	3.009	3	3.016	3	2.760	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12	PW01	12	Kota Sabang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
13	PW01	13	Kota Lhokseumawe	3.037	3	3.059	3	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14	PW01	14	Kabupaten Nagan Raya	3.012	3	2.944	2	2.820	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
15	PW01	15	Kabupaten Aceh Barat Daya	3.090	3	2.967	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
16	PW01	16	Kota Subulussalam	3.051	3	2.796	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
17	PW01	17	Kabupaten Pidie Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
18	PW01	18	Kabupaten Bireuen	3.056	3	3.013	3	2.956	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
19	PW01	19	Kabupaten Bener Meriah	2.805	2	2.806	2	2.410	2	Tidak	Panel Kedepuitian
20	PW01	20	Kabupaten Aceh Utara	3.052	3	2.917	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
21	PW01	21	Kabupaten Aceh Singkil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
22	PW01	22	Kabupaten Pidie	2.938	2	2.772	2	2.672	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
23	PW01	23	Kabupaten Aceh Selatan	3.188	3	3.148	3	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
			Provinsi Sumatera Utara								
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.942	2	2.977	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
25	PW02	2	Kabupaten Toba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
26	PW02	3	Kota Tebing Tinggi	2.939	2	2.997	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
27	PW02	4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.874	2	2.706	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	2.836	2	2.648	2	2.019	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.753	2	2.489	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
30	PW02	7	Kabupaten Deli Serdang	2.944	2	2.997	2	2.616	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31	PW02	8	Kabupaten Humbang Hasundutan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
32	PW02	9	Kota Binjai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33	PW02	10	Kabupaten Dairi	2.792	2	2.438	2	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
34	PW02	11	Kabupaten Karo	2.788	2	2.691	2	2.604	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanbatu	2.598	2	2.388	2	2.186	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
36	PW02	13	Kabupaten Mandailing Natal	2.480	2	2.225	2	1.168	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
37	PW02	14	Kota Pematangsiantar	2.924	2	2.744	2	2.874	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
38	PW02	15	Kota Tanjungbalai	2.879	2	2.888	2	2.856	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
39	PW02	16	Kota Padangsidimpuan	2.874	2	2.766	2	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
40	PW02	17	Kabupaten Serdang Bedagai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
41	PW02	18	Kabupaten Samosir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
42	PW02	19	Kabupaten Batubara	2.734	2	2.891	2	2.426	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
43	PW02	20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2.791	2	2.705	2	2.778	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
44	PW02	21	Kabupaten Padang Lawas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
45	PW02	22	Kabupaten Nias Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
46	PW02	23	Kabupaten Nias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
47	PW02	24	Kabupaten Nias Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
48	PW02	25	Kabupaten Nias Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
49	PW02	26	Kota Gunungsitoli	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
50	PW02	27	Kabupaten Pakpak Bharat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
51	PW02	28	Kota Sibolga	2.731	2	2.753	2	2.462	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
52	PW02	29	Kabupaten Langkat	2.434	2	2.491	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
53	PW02	30	Kabupaten Asahan	2.987	2	2.988	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
54	PW02	31	Kabupaten Simalungun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
55	PW02	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.731	2	2.752	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
56	PW02	33	Kota Medan	2.971	2	2.925	2	2.468	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
			Provinsi Sumatera Barat								
57	PW03	1	Kabupaten Tanah Datar	2.581	2	2.325	2	2.438	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
58	PW03	2	Kota Padang	2.966	2	2.913	2	2.436	2	Tidak	Panel Kedepuitian
59	PW03	3	Kabupaten Padang Pariaman	2.582	2	2.302	2	2.304	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
60	PW03	4	Kabupaten Pesisir Selatan	2.516	2	2.313	2	2.274	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
61	PW03	5	Kota Bukittinggi	2.942	2	2.731	2	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
62	PW03	6	Kota Payakumbuh	2.917	2	2.691	2	2.628	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
63	PW03	7	Kota Pariaman	2.583	2	2.488	2	2.490	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
64	PW03	8	Kabupaten Dharmasraya	2.682	2	2.378	2	2.328	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
65	PW03	9	Kota Solok	2.781	2	2.764	2	2.754	2	Tidak	Panel Kedepuitian
66	PW03	10	Kabupaten Agam	2.739	2	2.503	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
67	PW03	11	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.757	2	2.645	2	2.472	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
68	PW03	12	Kabupaten Pasaman	2.533	2	2.316	2	2.342	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
69	PW03	13	Kabupaten Solok	2.741	2	2.506	2	2.424	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
70	PW03	14	Kabupaten Sijunjung	2.795	2	2.573	2	2.580	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
71	PW03	15	Kota Sawahlunto	2.754	2	2.566	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
72	PW03	16	Kabupaten Solok Selatan	2.512	2	2.448	2	2.490	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
73	PW03	17	Kabupaten Pasaman Barat	2.581	2	2.511	2	2.470	2	Tidak	Panel Kedepuitan
74	PW03	18	Kota Padang Panjang	2.690	2	2.566	2	2.472	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
75	PW03	19	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.735	2	2.481	2	2.538	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
4			Provinsi Riau								
76	PW04	1	Kabupaten Kepulauan Meranti	2.563	2	2.502	2	1.818	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
77	PW04	2	Kabupaten Kampar	2.681	2	2.388	2	2.120	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
78	PW04	3	Kabupaten Pelalawan	2.735	2	2.538	2	1.304	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
79	PW04	4	Kabupaten Indragiri Hilir	2.738	2	2.533	2	2.362	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
80	PW04	5	Kabupaten Siak	2.884	2	2.844	2	1.910	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
81	PW04	6	Kabupaten Indragiri Hulu	2.743	2	2.691	2	2.544	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
82	PW04	7	Kota Pekanbaru	2.508	2	2.564	2	1.090	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
83	PW04	8	Kabupaten Rokan Hulu	2.833	2	2.588	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
84	PW04	9	Kabupaten Kuantan Singingi	2.663	2	2.584	2	1.974	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
85	PW04	10	Kota Dumai	2.930	2	2.900	2	3.036	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
86	PW04	11	Kabupaten Rokan Hilir	2.747	2	2.631	2	2.610	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
87	PW04	12	Kabupaten Bengkalis	2.872	2	2.866	2	2.378	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
5			Provinsi Jambi								
88	PW05	1	Kabupaten Batanghari	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
89	PW05	2	Kota Sungai Penuh	2.859	2	2.566	2	2.910	2	Tidak	Panel Kedepuitan
90	PW05	3	Kabupaten Bungo	2.794	2	2.800	2	2.000	2	Tidak	Panel Kedepuitan
91	PW05	4	Kota Jambi	2.690	2	2.313	2	2.940	2	Tidak	Panel Kedepuitan
92	PW05	5	Kabupaten Tebo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
93	PW05	6	Kabupaten Merangin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
94	PW05	7	Kabupaten Muaro Jambi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
95	PW05	8	Kabupaten Kerinci	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
96	PW05	9	Kabupaten Sarolangun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
97	PW05	10	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.794	2	2.800	2	2.000	2	Tidak	Panel Kedepuitan
98	PW05	11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
6			Provinsi Bengkulu								
99	PW06	1	Kabupaten Lebong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
100	PW06	2	Kabupaten Bengkulu Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
101	PW06	3	Kabupaten Seluma	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
102	PW06	4	Kabupaten Bengkulu Selatan	2.576	2	2.494	2	2.622	2	Tidak	Panel Kedepuitan
103	PW06	5	Kabupaten Kepahiang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
104	PW06	6	Kabupaten Bengkulu Tengah	2.586	2	2.489	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
105	PW06	7	Kabupaten Kaur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
106	PW06	8	Kota Bengkulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
107	PW06	9	Kabupaten Rejang Lebong	2.666	2	2.459	2	2.606	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
108	PW06	10	Kabupaten Mukomuko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
7			Provinsi Sumatera Selatan								
109	PW07	1	Kabupaten Lahat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
110	PW07	2	Kabupaten Muara Enim	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
111	PW07	3	Kabupaten Banyuasin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
112	PW07	4	Kabupaten Musi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
113	PW07	5	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2.735	2	2.488	2	2.868	2	Tidak	Panel Kedepuitan
114	PW07	6	Kabupaten Musi Rawas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
115	PW07	7	Kota Pagar Alam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
116	PW07	8	Kota Lubuk Linggau	3.132	3	2.805	2	2.596	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
117	PW07	9	Kota Palembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
118	PW07	10	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
119	PW07	11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
120	PW07	12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
121	PW07	13	Kabupaten Empat Lawang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
122	PW07	14	Kabupaten Ogan Komering Ulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
123	PW07	15	Kota Prabumulih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
124	PW07	16	Kabupaten Musi Rawas Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
125	PW07	17	Kabupaten Ogan Ilir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
8			Provinsi Lampung								
126	PW08	1	Kota Metro	3.089	3	2.866	2	2.550	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
127	PW08	2	Kota Bandar Lampung	3.096	3	2.797	2	2.418	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
128	PW08	3	Kabupaten Pesawaran	3.036	3	2.888	2	2.036	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
129	PW08	4	Kabupaten Lampung Selatan	3.165	3	3.009	3	2.820	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
130	PW08	5	Kabupaten Tanggamus	3.095	3	2.809	2	2.490	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
131	PW08	6	Kabupaten Way Kanan	3.087	3	2.908	2	2.524	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
132	PW08	7	Kabupaten Tulang Bawang	3.109	3	2.845	2	2.740	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
133	PW08	8	Kabupaten Lampung Timur	3.150	3	2.959	2	2.748	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025							
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
134	PW08	9	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.025	3	2.998	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
135	PW08	10	Kabupaten Pringsewu	2.813	2	2.515	2	2.342	2	Tidak	Panel Kedepuitan
136	PW08	11	Kabupaten Lampung Tengah	3.173	3	3.014	3	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
137	PW08	13	Kabupaten Lampung Utara	2.751	2	2.769	2	2.310	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
138	PW08	14	Kabupaten Mesuji	2.921	2	2.533	2	2.740	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
139	PW08	12	Kabupaten Lampung Barat	3.189	3	3.034	3	2.840	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
140	PW08	15	Kabupaten Pesisir Barat	3.034	3	2.725	2	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
9			Provinsi DKI Jakarta								
10			Provinsi Jawa Barat								
141	PW10	1	Kota Bekasi	3.010	3	2.873	2	2.604	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
142	PW10	2	Kota Banjar	2.548	2	2.400	2	2.798	2	Tidak	Panel Kedepuitan
143	PW10	3	Kabupaten Kuningan	3.045	3	2.947	2	2.734	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
144	PW10	4	Kabupaten Indramayu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
145	PW10	5	Kota Depok	2.642	2	2.552	2	2.682	2	Tidak	Panel Kedepuitan
146	PW10	6	Kabupaten Sumedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
147	PW10	7	Kabupaten Bandung	3.360	3	3.191	3	2.670	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
148	PW10	8	Kabupaten Garut	2.790	2	2.711	2	2.782	2	Tidak	Panel Kedepuitan
149	PW10	9	Kabupaten Sukabumi	3.059	3	3.000	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
150	PW10	10	Kabupaten Bogor	2.818	2	2.766	2	2.532	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
151	PW10	11	Kabupaten Pangandaran	2.705	2	2.650	2	2.266	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
152	PW10	12	Kabupaten Ciamis	3.129	3	3.191	3	2.638	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
153	PW10	13	Kota Bogor	3.194	3	3.150	3	2.934	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
154	PW10	14	Kota Bandung	3.096	3	2.794	2	2.378	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
155	PW10	15	Kabupaten Subang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
156	PW10	16	Kota Cirebon	2.907	2	2.640	2	2.266	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
157	PW10	17	Kota Sukabumi	3.025	3	2.931	2	2.432	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
158	PW10	18	Kabupaten Purwakarta	3.237	3	3.028	3	2.790	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
159	PW10	19	Kabupaten Tasikmalaya	2.892	2	2.644	2	2.436	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
160	PW10	20	Kabupaten Cirebon	2.850	2	2.534	2	2.766	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
161	PW10	21	Kota Tasikmalaya	3.063	3	2.978	2	2.496	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
162	PW10	22	Kabupaten Bekasi	2.722	2	2.694	2	2.262	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
163	PW10	23	Kabupaten Cianjur	2.830	2	2.525	2	2.832	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
164	PW10	24	Kabupaten Karawang	3.090	3	2.981	2	2.508	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
165	PW10	25	Kabupaten Bandung Barat	2.855	2	2.798	2	2.742	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
166	PW10	26	Kabupaten Majalengka	3.076	3	3.006	3	2.532	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
167	PW10	27	Kota Cimahi	3.002	3	3.116	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
11			Provinsi Jawa Tengah								
168	PW11	1	Kabupaten Boyolali	2.938	2	2.823	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
169	PW11	2	Kabupaten Karanganyar	3.132	3	2.938	2	2.820	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
170	PW11	3	Kabupaten Kudus	2.948	2	2.830	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
171	PW11	4	Kota Surakarta	3.053	3	2.931	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
172	PW11	5	Kabupaten Pekalongan	2.941	2	2.847	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
173	PW11	6	Kota Semarang	2.799	2	2.531	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
174	PW11	7	Kabupaten Banyumas	2.977	2	2.902	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
175	PW11	8	Kabupaten Blora	2.896	2	2.647	2	2.940	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
176	PW11	9	Kabupaten Pati	2.953	2	2.763	2	2.904	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
177	PW11	10	Kabupaten Sragen	2.739	2	2.588	2	2.672	2	Tidak	Panel Kedepuitan
178	PW11	11	Kabupaten Temanggung	2.979	2	2.911	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
179	PW11	12	Kota Pekalongan	2.742	2	2.697	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
180	PW11	13	Kota Salatiga	2.921	2	2.853	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
181	PW11	14	Kabupaten Grobogan	2.974	2	2.905	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
182	PW11	15	Kabupaten Banjarnegara	2.975	2	2.825	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
183	PW11	16	Kabupaten Tegal	2.601	2	2.528	2	2.706	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
184	PW11	17	Kabupaten Kendal	2.756	2	2.572	2	2.832	2	Tidak	Panel Kedepuitan
185	PW11	18	Kabupaten Demak	2.988	2	2.938	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
186	PW11	19	Kabupaten Wonogiri	2.963	2	2.816	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
187	PW11	20	Kabupaten Batang	2.584	2	2.519	2	2.814	2	Tidak	Panel Kedepuitan
188	PW11	21	Kabupaten Pemalang	2.930	2	2.734	2	2.730	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
189	PW11	22	Kabupaten Sukoharjo	2.794	2	2.650	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
190	PW11	23	Kabupaten Wonosobo	2.867	2	2.775	2	2.788	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
191	PW11	24	Kabupaten Semarang	2.776	2	2.666	2	2.676	2	Tidak	Panel Kedepuitan
192	PW11	25	Kabupaten Purbalingga	3.174	3	2.981	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
193	PW11	26	Kabupaten Rembang	2.978	2	2.911	2	2.742	2	Tidak	Panel Kedepuitan
194	PW11	27	Kabupaten Brebes	2.825	2	2.666	2	2.784	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
195	PW11	28	Kota Tegal	2.765	2	2.509	2	2.706	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
196	PW11	29	Kabupaten Jepara	2.965	2	2.897	2	2.734	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
12			Provinsi DI Yogyakarta								
197	PW12	1	Kabupaten Purworejo	3.320	3	3.098	3	2.670	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
198	PW12	2	Kabupaten Cilacap	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
199	PW12	3	Kabupaten Bantul	3.216	3	3.225	3	2.664	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
200	PW12	4	Kota Magelang	2.828	2	2.559	2	2.760	2	Tidak	Panel Kedepuitan
201	PW12	5	Kabupaten Magelang	3.156	3	3.325	3	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
202	PW12	6	Kabupaten Gunungkidul	3.072	3	2.838	2	2.584	2	Tidak	Panel Kedepuitan
203	PW12	7	Kabupaten Sleman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
204	PW12	8	Kabupaten Kebumen	2.695	2	2.573	2	2.600	2	Tidak	Panel Kedepuitan
205	PW12	9	Kabupaten Klaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
206	PW12	10	Kabupaten Kulon Progo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
207	PW12	11	Kota Yogyakarta	3.399	3	3.369	3	2.752	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
13			Provinsi Jawa Timur								
208	PW13	1	Kabupaten Banyuwangi	3.131	3	3.072	3	2.722	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
209	PW13	2	Kota Surabaya	3.070	3	3.006	3	3.112	3	Ya	Panel Kedepuitan
210	PW13	3	Kabupaten Bojonegoro	3.201	3	2.968	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
211	PW13	4	Kabupaten Bondowoso	2.448	2	2.017	2	1.551	1	Tidak	Panel Kedepuitan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025							
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
212	PW13	5	Kabupaten Jombang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
213	PW13	6	Kabupaten Lumajang	3.150	3	3.105	3	2.676	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
214	PW13	7	Kabupaten Pacitan	2.772	2	2.731	2	2.670	2	Tidak	Panel Kedepuitan
215	PW13	8	Kabupaten Pasuruan	3.032	3	2.961	2	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
216	PW13	9	Kabupaten Ponorogo	2.821	2	2.693	2	2.158	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
217	PW13	10	Kabupaten Probolinggo	2.524	2	2.030	2	1.616	1	Tidak	Panel Kedepuitan
218	PW13	11	Kabupaten Tulungagung	2.929	2	2.791	2	2.670	2	Tidak	Panel Kedepuitan
219	PW13	12	Kota Blitar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
220	PW13	13	Kota Mojokerto	3.257	3	3.152	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
221	PW13	14	Kota Malang	3.068	3	3.031	3	2.766	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
222	PW13	15	Kabupaten Blitar	3.287	3	2.978	2	2.524	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
223	PW13	16	Kabupaten Lamongan	2.935	2	2.741	2	2.802	2	Tidak	Panel Kedepuitan
224	PW13	17	Kabupaten Situbondo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
225	PW13	18	Kota Probolinggo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
226	PW13	19	Kota Kediri	2.964	2	2.881	2	2.646	2	Tidak	Panel Kedepuitan
227	PW13	20	Kabupaten Gresik	3.343	3	2.997	2	2.430	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
228	PW13	21	Kabupaten Kediri	2.882	2	2.570	2	2.592	2	Tidak	Panel Kedepuitan
229	PW13	22	Kabupaten Sidoarjo	3.265	3	2.952	2	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
230	PW13	23	Kabupaten Pamekasan	3.046	3	3.041	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
231	PW13	24	Kabupaten Sumenep	3.127	3	3.028	3	2.464	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
232	PW13	25	Kota Madiun	3.289	3	3.063	3	2.736	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
233	PW13	26	Kabupaten Magetan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
234	PW13	27	Kabupaten Trenggalek	3.101	3	2.809	2	2.502	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
235	PW13	28	Kabupaten Ngawi	3.240	3	3.156	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
236	PW13	29	Kabupaten Tuban	3.200	3	2.995	2	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
237	PW13	30	Kabupaten Madiun	3.290	3	3.073	3	2.706	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
238	PW13	31	Kota Pasuruan	3.167	3	3.028	3	2.670	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
239	PW13	32	Kota Batu	3.178	3	3.069	3	2.482	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
240	PW13	33	Kabupaten Nganjuk	3.199	3	3.194	3	2.918	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
241	PW13	34	Kabupaten Jember	3.008	3	2.813	2	2.580	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
242	PW13	35	Kabupaten Sampang	3.219	3	3.056	3	2.970	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
243	PW13	36	Kabupaten Mojokerto	3.245	3	3.125	3	2.984	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
244	PW13	37	Kabupaten Malang	3.175	3	3.169	3	2.080	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
245	PW13	38	Kabupaten Bangkalan	3.130	3	2.925	2	2.340	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
14			Provinsi Kalimantan Barat								
246	PW14	1	Kota Pontianak	3.337	3	3.019	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
247	PW14	2	Kabupaten Landak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
248	PW14	3	Kabupaten Sintang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
249	PW14	4	Kabupaten Sanggau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
250	PW14	5	Kabupaten Kubu Raya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
251	PW14	6	Kota Singkawang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
252	PW14	7	Kabupaten Mempawah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
253	PW14	8	Kabupaten Sekadau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
254	PW14	9	Kabupaten Ketapang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
255	PW14	10	Kabupaten Kapuas Hulu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
256	PW14	11	Kabupaten Melawi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
257	PW14	12	Kabupaten Kayong Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
258	PW14	13	Kabupaten Bengkayang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
259	PW14	14	Kabupaten Sambas	3.070	3	2.913	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
15			Provinsi Kalimantan Tengah								
260	PW15	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
261	PW15	2	Kabupaten Kotawaringin Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
262	PW15	3	Kabupaten Lamandau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
263	PW15	4	Kota Palangka Raya	2.679	2	2.777	2	2.526	2	Tidak	Panel Kedepuitan
264	PW15	5	Kabupaten Pulang Pisau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
265	PW15	6	Kabupaten Barito Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
266	PW15	7	Kabupaten Gunung Mas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
267	PW15	8	Kabupaten Barito Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
268	PW15	9	Kabupaten Barito Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
269	PW15	10	Kabupaten Sukamara	2.868	2	2.659	2	2.772	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
270	PW15	11	Kabupaten Kapuas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
271	PW15	12	Kabupaten Murung Raya	2.859	2	2.653	2	2.616	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
272	PW15	13	Kabupaten Katingan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
273	PW15	14	Kabupaten Seruyan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
16			Provinsi Kalimantan Selatan								
274	PW16	1	Kabupaten Banjar	3.095	3	2.906	2	2.830	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
275	PW16	2	Kota Banjarmasin	3.070	3	2.969	2	3.080	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
276	PW16	3	Kota Banjarbaru	3.105	3	3.034	3	2.546	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
277	PW16	4	Kabupaten Tabalong	3.073	3	2.963	2	2.600	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
278	PW16	5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.182	3	2.884	2	2.876	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
279	PW16	6	Kabupaten Balangan	3.154	3	3.053	3	2.832	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
280	PW16	7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.259	3	3.272	3	2.642	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
281	PW16	8	Kabupaten Tapin	3.053	3	3.000	3	2.742	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
282	PW16	9	Kabupaten Tanah Bumbu	3.011	3	2.797	2	2.736	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
283	PW16	10	Kabupaten Kotabaru	3.017	3	2.519	2	2.104	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
284	PW16	11	Kabupaten Tanah Laut	3.149	3	3.106	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
285	PW16	12	Kabupaten Barito Kuala	2.423	2	2.219	2	2.598	2	Tidak	Panel Kedepuitan
286	PW16	13	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2.709	2	2.656	2	2.688	2	Tidak	Panel Kedepuitan



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025																
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi									
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level											
17			Provinsi Kalimantan Timur																	
287	PW17	1	Kota Bontang	3.177	3	3.100	3	2.832	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
288	PW17	2	Kota Samarinda	3.214	3	3.102	3	2.658	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
289	PW17	3	Kabupaten Penajam Paser Utara	2.391	2	2.409	2	1.000	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
290	PW17	4	Kabupaten Berau	3.187	3	3.155	3	2.532	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
291	PW17	5	Kabupaten Kutai Barat	2.618	2	2.316	2	2.682	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
292	PW17	6	Kabupaten Kutai Timur	2.714	2	2.625	2	2.145	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
293	PW17	7	Kabupaten Paser	3.191	3	3.177	3	2.514	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
294	PW17	8	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.920	2	2.928	2	2.478	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
295	PW17	9	Kota Balikpapan	3.018	3	3.020	3	2.730	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
296	PW17	10	Kabupaten Mahakam Ulu	2.882	2	2.691	2	2.328	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
18			Provinsi Sulawesi Utara																	
297	PW18	1	Kota Manado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
298	PW18	2	Kota Kotamobagu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
299	PW18	3	Kabupaten Kepulauan Talaud	2.823	2	2.767	2	2.766	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
300	PW18	4	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
301	PW18	5	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2.414	2	2.113	2	2.168	2	Tidak	Panel Kedepujian									
302	PW18	6	Kabupaten Minahasa Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
303	PW18	7	Kota Tomohon	2.398	2	2.116	2	2.814	2	Tidak	Panel Kedepujian									
304	PW18	8	Kabupaten Kepulauan Sangihe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
305	PW18	9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
306	PW18	10	Kabupaten Minahasa Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
307	PW18	11	Kabupaten Minahasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
308	PW18	12	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
309	PW18	13	Kabupaten Bolaang Mongondow	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
310	PW18	14	Kota Bitung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
311	PW18	15	Kabupaten Minahasa Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
19			Provinsi Sulawesi Tengah																	
312	PW19	1	Kota Palu	2.372	2	2.347	2	2.514	2	Tidak	Panel Kedepujian									
313	PW19	2	Kabupaten Tojo Una Una	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
314	PW19	3	Kabupaten Poso	3.031	3	3.005	3	2.580	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
315	PW19	4	Kabupaten Buol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
316	PW19	5	Kabupaten Banggai Laut	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
317	PW19	6	Kabupaten Morowali	2.820	2	2.925	2	2.574	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
318	PW19	7	Kabupaten Banggai	2.725	2	2.503	2	2.464	2	Tidak	Panel Kedepujian									
319	PW19	8	Kabupaten Parigi Moutong	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
320	PW19	9	Kabupaten Banggai Kepulauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
321	PW19	10	Kabupaten Donggala	2.687	2	2.844	2	2.568	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
322	PW19	11	Kabupaten Morowali Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
323	PW19	12	Kabupaten Tolitoli	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
324	PW19	13	Kabupaten Sigi	3.102	3	3.231	3	2.724	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
20			Provinsi Sulawesi Tenggara																	
325	PW20	1	Kota Baubau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
326	PW20	2	Kabupaten Konawe Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
327	PW20	3	Kabupaten Kolaka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
328	PW20	4	Kabupaten Bombana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
329	PW20	5	Kota Kendari	2.732	2	2.745	2	2.862	2	Tidak	Panel Kedepujian									
330	PW20	6	Kabupaten Buton	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
331	PW20	7	Kabupaten Wakatobi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
332	PW20	8	Kabupaten Kolaka Utara	2.927	2	2.813	2	2.126	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
333	PW20	9	Kabupaten Muna	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
334	PW20	10	Kabupaten Buton Tengah	2.602	2	2.263	2	2.460	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
335	PW20	11	Kabupaten Konawe Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
336	PW20	12	Kabupaten Konawe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
337	PW20	13	Kabupaten Muna Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
338	PW20	14	Kabupaten Buton Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
339	PW20	15	Kabupaten Konawe Kepulauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
340	PW20	16	Kabupaten Kolaka Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
341	PW20	17	Kabupaten Buton Selatan	2.963	2	2.861	2	2.838	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
21			Provinsi Sulawesi Selatan																	
342	PW21	1	Kabupaten Pinrang	3.007	3	2.981	2	2.868	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
343	PW21	2	Kabupaten Luwu Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
344	PW21	3	Kota Makassar	3.011	3	2.889	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
345	PW21	4	Kabupaten Toraja Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
346	PW21	5	Kabupaten Soppeng	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
347	PW21	6	Kabupaten Gowa	2.773	2	2.719	2	2.526	2	Tidak	Panel Kedepujian									
348	PW21	7	Kabupaten Luwu Timur	3.183	3	2.894	2	2.874	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									
349	PW21	8	Kabupaten Bulukumba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi									
350	PW21	9	Kabupaten Wajo	3.090	3	2.978	2	2.718	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan									



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025						Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				SPIP		MR		IEPK			
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
351	PW21	10	Kota Palopo	3.191	3	2.541	2	2.060	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
352	PW21	11	Kabupaten Sidenreng Rappang	3.011	3	2.773	2	2.830	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
353	PW21	12	Kabupaten Bantaeng	3.155	3	2.572	2	2.156	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
354	PW21	13	Kabupaten Luwu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
355	PW21	14	Kabupaten Maros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
356	PW21	15	Kabupaten Enrekang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
357	PW21	16	Kabupaten Barru	3.091	3	2.950	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
358	PW21	17	Kabupaten Jeneponto	2.652	2	2.244	2	2.136	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
359	PW21	18	Kabupaten Kep. Selayar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
360	PW21	19	Kabupaten Sinjai	2.985	2	2.972	2	2.976	2	Tidak	Panel Ke deputian
361	PW21	20	Kabupaten Takalar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
362	PW21	21	Kabupaten Tana Toraja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
363	PW21	22	Kota Parepare	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
364	PW21	23	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	3.105	3	3.011	3	2.640	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
365	PW21	24	Kabupaten Bone	3.099	3	3.027	3	3.000	3	Ya	Evaluasi Perwakilan
22			Provinsi Bali								
366	PW22	1	Kabupaten Badung	3.156	3	3.017	3	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
367	PW22	2	Kabupaten Gianyar	3.099	3	3.059	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
368	PW22	3	Kota Denpasar	3.000	3	3.000	3	3.000	3	Ya	Panel Ke deputian
369	PW22	4	Kabupaten Tabanan	3.018	3	3.003	3	2.874	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
370	PW22	5	Kabupaten Karangasem	3.003	3	2.794	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
371	PW22	6	Kabupaten Klungkung	3.096	3	3.016	3	2.964	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
372	PW22	7	Kabupaten Bangli	3.067	3	2.956	2	3.000	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
373	PW22	8	Kabupaten Jembrana	2.733	2	2.548	2	2.652	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
374	PW22	9	Kabupaten Buleleng	3.038	3	2.752	2	2.814	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
23			Provinsi Nusa Tenggara Barat								
375	PW23	1	Kabupaten Lombok Tengah	3.183	3	3.109	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
376	PW23	2	Kota Mataram	2.653	2	2.673	2	2.808	2	Tidak	Panel Ke deputian
377	PW23	3	Kabupaten Sumbawa Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
378	PW23	4	Kabupaten Sumbawa	2.728	2	2.472	2	2.652	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
379	PW23	5	Kabupaten Bima	3.009	3	2.897	2	2.518	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
380	PW23	6	Kabupaten Lombok Utara	3.062	3	2.939	2	2.868	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
381	PW23	7	Kota Bima	2.920	2	2.798	2	2.458	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
382	PW23	8	Kabupaten Dompu	2.460	2	2.061	2	2.556	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
383	PW23	9	Kabupaten Lombok Barat	2.543	2	2.478	2	2.910	2	Tidak	Panel Ke deputian
384	PW23	10	Kabupaten Lombok Timur	3.148	3	2.981	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
24			Provinsi Nusa Tenggara Timur								
385	PW24	1	Kabupaten Sikka	2.437	2	2.097	2	1.000	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
386	PW24	2	Kabupaten Sumba Timur	2.921	2	2.638	2	2.366	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
387	PW24	3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
388	PW24	4	Kabupaten Belu	2.966	2	2.694	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
389	PW24	5	Kabupaten Flores Timur	2.695	2	2.375	2	2.348	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
390	PW24	6	Kabupaten Alor	2.939	2	2.700	2	2.742	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
391	PW24	7	Kabupaten Ende	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
392	PW24	8	Kabupaten Kupang	2.051	2	1.616	1	2.326	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
393	PW24	9	Kabupaten Lembata	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
394	PW24	10	Kabupaten Manggarai	2.824	2	2.448	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
395	PW24	11	Kabupaten Ngada	2.491	2	2.230	2	1.176	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
396	PW24	12	Kabupaten Sumba Barat	2.050	2	1.644	1	1.742	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
397	PW24	13	Kota Kupang	2.197	2	1.931	1	1.000	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
398	PW24	14	Kabupaten Rote Ndao	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
399	PW24	15	Kabupaten Nagekeo	2.578	2	2.150	2	2.382	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
400	PW24	16	Kabupaten Sumba Barat Daya	2.335	2	1.956	1	1.534	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
401	PW24	17	Kabupaten Sumba Tengah	2.331	2	1.969	1	1.634	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
402	PW24	18	Kabupaten Manggarai Timur	2.874	2	2.450	2	2.070	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
403	PW24	19	Kabupaten Malaka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
404	PW24	20	Kabupaten Timor Tengah Utara	2.357	2	2.094	2	2.466	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
405	PW24	21	Kabupaten Manggarai Barat	3.020	3	2.830	2	2.634	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
406	PW24	22	Kabupaten Sabu Raijua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
25			Provinsi Maluku								
407	PW25	1	Kota Ambon	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
408	PW25	2	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
409	PW25	3	Kabupaten Maluku Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
410	PW25	4	Kabupaten Maluku Tengah	2.548	2	2.413	2	2.548	2	Tidak	Panel Ke deputian
411	PW25	5	Kota Tual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
412	PW25	6	Kabupaten Seram Bagian Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
413	PW25	7	Kabupaten Maluku Barat Daya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
414	PW25	8	Kabupaten Buru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
415	PW25	9	Kabupaten Seram Bagian Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025							
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level		
416	PW25	10	Kabupaten Kepulauan Aru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
417	PW25	11	Kabupaten Buru Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
26			Provinsi Papua								
418	PW26	1	Kabupaten Merauke	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
419	PW26	2	Kota Jayapura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
420	PW26	4	Kabupaten Lanny Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
421	PW26	6	Kabupaten Jayapura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
422	PW26	8	Kabupaten Asmat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
423	PW26	9	Kabupaten Kep. Yapen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
424	PW26	10	Kabupaten Keerom	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
425	PW26	11	Kabupaten Supiori	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
426	PW26	12	Kabupaten Jayawijaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
427	PW26	13	Kabupaten Yahukimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
428	PW26	14	Kabupaten Tolikara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
429	PW26	15	Kabupaten Yalimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
430	PW26	16	Kabupaten Nduga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
431	PW26	18	Kabupaten Peg. Bintang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
432	PW26	19	Kabupaten Waropen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
433	PW26	20	Kabupaten Sarmi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
434	PW26	21	Kabupaten Biak Numfor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
435	PW26	24	Kabupaten Boven Digoel	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
436	PW26	25	Kabupaten Mappi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
437	PW26	26	Kabupaten Mamberamo Raya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
438	PW26	27	Kabupaten Mamberamo Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
27			Provinsi Papua Barat								
439	PW27	1	Kabupaten Teluk Bintuni	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
440	PW27	2	Kabupaten Teluk Wondama	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
441	PW27	3	Kabupaten Manokwari Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
442	PW27	4	Kabupaten Pegunungan Arfak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
443	PW27	5	Kabupaten Fakfak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
444	PW27	6	Kabupaten Manokwari	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
445	PW27	7	Kabupaten Kaimana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
28			Provinsi Kepulauan Riau								
446	PW28	1	Kota Tanjungpinang	2.780	2	2.673	2	2.766	2	Tidak	Panel Kedepuitan
447	PW28	2	Kabupaten Karimun	2.686	2	2.600	2	2.778	2	Tidak	Panel Kedepuitan
448	PW28	3	Kabupaten Bintan	2.566	2	2.475	2	2.536	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
449	PW28	4	Kota Batam	2.643	2	2.498	2	2.748	2	Tidak	Panel Kedepuitan
450	PW28	5	Kabupaten Kepulauan Anambas	2.444	2	2.120	2	2.148	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
451	PW28	6	Kabupaten Lingga	2.560	2	2.489	2	2.694	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
452	PW28	7	Kabupaten Natuna	2.950	2	2.903	2	2.676	2	Tidak	Panel Kedepuitan
29			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								
453	PW29	1	Kabupaten Bangka Tengah	2.898	2	2.656	2	2.436	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
454	PW29	2	Kabupaten Bangka	2.856	2	2.867	2	2.702	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
455	PW29	3	Kabupaten Belitung	2.449	2	2.448	2	2.702	2	Tidak	Panel Kedepuitan
456	PW29	4	Kabupaten Belitung Timur	2.468	2	2.495	2	2.702	2	Tidak	Panel Kedepuitan
457	PW29	5	Kabupaten Bangka Barat	2.310	2	1.950	1	1.846	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
458	PW29	6	Kota Pangkalpinang	2.678	2	2.800	2	2.526	2	Tidak	Panel Kedepuitan
459	PW29	7	Kabupaten Bangka Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
30			Provinsi Banten								
460	PW30	1	Kabupaten Serang	3.023	3	2.991	2	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
461	PW30	2	Kota Tangerang	3.119	3	3.088	3	2.910	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
462	PW30	3	Kota Tangerang Selatan	3.180	3	2.920	2	3.096	3	Tidak	Evaluasi Perwakilan
463	PW30	4	Kabupaten Tangerang	2.600	2	2.575	2	2.580	2	Tidak	Panel Kedepuitan
464	PW30	5	Kabupaten Lebak	3.006	3	2.956	2	2.928	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
465	PW30	6	Kabupaten Pandeglang	3.152	3	3.063	3	2.656	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
466	PW30	7	Kota Cilegon	2.453	2	2.406	2	2.330	2	Tidak	Panel Kedepuitan
467	PW30	8	Kota Serang	2.903	2	2.800	2	2.119	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
31			Provinsi Gorontalo								
468	PW31	1	Kabupaten Gorontalo	2.712	2	2.462	2	1.483	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
469	PW31	2	Kota Gorontalo	2.367	2	1.954	1	1.620	1	Tidak	Panel Kedepuitan
470	PW31	3	Kabupaten Pohuwato	2.813	2	2.667	2	2.000	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
471	PW31	4	Kabupaten Bone Bolango	2.972	2	2.891	2	2.496	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
472	PW31	5	Kabupaten Boalemo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
473	PW31	6	Kabupaten Gorontalo Utara	2.900	2	2.659	2	1.864	1	Tidak	Evaluasi Perwakilan
32			Provinsi Sulawesi Barat								
474	PW32	1	Kabupaten Majene	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
475	PW32	2	Kabupaten Mamuju	3.181	3	2.877	2	2.464	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
476	PW32	3	Kabupaten Polewali Mandar	2.914	2	2.897	2	2.446	2	Tidak	Evaluasi Perwakilan
477	PW32	4	Kabupaten Pasangkayu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
478	PW32	5	Kabupaten Mamasa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
479	PW32	6	Kabupaten Mamuju Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
33			Provinsi Maluku Utara								
480	PW33	1	Kabupaten Halmahera Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A



No. Urut	Kode Pw	No	Perwakilan	SPIP Terintegrasi 2025								
				SPIP		MR		IEPK		Status Terdefinisi	Keterangan Evaluasi	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level			
481	PW33	2	Kota Tidore Kepulauan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
482	PW33	3	Kabupaten Halmahera Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
483	PW33	4	Kabupaten Pulau Taliabu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
484	PW33	5	Kabupaten Halmahera Barat	2.506	2	2.475	2	2.646	2	Tidak		Panel Kedepuitian
485	PW33	6	Kabupaten Kepulauan Sula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
486	PW33	7	Kabupaten Halmahera Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
487	PW33	8	Kabupaten Pulau Morotai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
488	PW33	9	Kabupaten Halmahera Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu N/A
489	PW33	10	Kota Ternate	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Menggunakan skor tahun lalu
34			Provinsi Kalimantan Utara									
490	PW34	1	Kabupaten Nunukan	3.168	3	2.970	2	2.549	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
491	PW34	2	Kabupaten Malinau	3.094	3	2.903	2	2.634	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
492	PW34	3	Kota Tarakan	2.725	2	2.434	2	2.730	2	Tidak		Panel Kedepuitian
493	PW34	4	Kabupaten Bulungan	3.174	3	3.250	3	2.964	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
494	PW34	5	Kabupaten Tana Tidung	3.138	3	3.194	3	2.402	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
35			Provinsi Papua Barat Daya									
495	PW35	1	Kabupaten Sorong	2.287	2	2.216	2	2.300	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
496	PW35	2	Kota Sorong	1.845	1	1.413	1	2.144	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
497	PW35	3	Kabupaten Sorong Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
498	PW35	4	Kabupaten Raja Ampat	2.412	2	2.091	2	2.246	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
499	PW35	5	Kabupaten Tambrauw	2.219	2	1.988	1	1.392	1	Tidak		Evaluasi Perwakilan
500	PW35	6	Kabupaten Maybrat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
36			Provinsi Papua Tengah									
501	PW36	1	Kabupaten Nabire	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
502	PW36	2	Kabupaten Puncak Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
503	PW36	3	Kabupaten Intan Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
504	PW36	4	Kabupaten Puncak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
505	PW36	5	Kabupaten Mimika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
506	PW36	6	Kabupaten Paniai	2.271	2	2.040	2	2.394	2	Tidak		Evaluasi Perwakilan
507	PW36	7	Kabupaten Dogiyai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi
508	PW36	8	Kabupaten Deiyai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tidak dilakukan evaluasi

Keterangan	SPIP	%	MRI	%	IEPK	%
Level 5	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 4	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Level 3	126	24.80%	62	12.20%	12	2.36%
Level 2	186	36.61%	242	47.63%	281	55.31%
Level 1	1	0.20%	9	1.77%	20	3.94%
N/A	195	38.39%	195	38.39%	195	38.38%
TOTAL	508	100.00%	508	100.00%	508	100.00%
Terdefinisi			2			
Panel Kedepuitian			56			
Evaluasi Perwakilan			257			
Total Panel + Evaluasi			313			



